VOLUME XII / NO. 123 / DESEMBER 2017

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

AKSELERASI EKONOMI BERKEADILAN

APBN 2018 disusun lebih produktif, efisien, dan tetap berdaya tahan. Pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, dan penguatan desentralisasi fiskal menjadi komitmen pemerintah guna mengakselarasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

ISSN 1907-6320

MK

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui

App Store Google Play

Daftar Isi

Foto *Cover*
Langgeng Wahyu P.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA
15 Manfaatkan Potensi dan Momentum Ekonomi
18 Infografis
20 Mengakselerasi Pemerataan Ekonomi
23 Geliat Demokrasi Gerakkan Ekonomi
25 APBN Merata, Masyarakat Sejahtera

WAWANCARA
27 Bahasa Indonesia Itu Mudah

POTRET KANTOR
30 PKPM, BKF: Rumusan Ekonomi Makro Penentu Kebijakan

FIGUR
32 Meneladani Elan Transformasi STAN

EKONOMI TERKINI
36 Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Dorong Pertumbuhan Ekonomi

KOLOM EKONOM
40 Reformasi Struktural Percepat Pertumbuhan Ekonomi

GENERASI EMAS
44 Pendidik Berprestasi, Kaya Kontribusi

OPINI
46 Pajak Berkeadilan Untuk e-Commerce

REGULASI
48 Kendalikan Konsumsi, Cukai Rokok Rata-Rata Naik 10,4 persen di 2018

INSPIRASI
50 Di Balik Cerita Sang Juru Kamera

RENUNGAN
52 Ada Jerih dalam Proses yang Patut Dihargai

FILM
53 Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak

JALAN-JALAN
54 Menjelajahi Eksotisme Kupang

SELEBRITI
56 Inspirasi dari Industri Animasi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Riahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Triana Kusumadewi, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin,. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Menciptakan Pemerataan dan Keadilan melalui APBN 2018

Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 telah disahkan oleh DPR pada Oktober 2017. Dengan perkiraan pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun, fokus APBN 2018 adalah untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Untuk belanja negara, dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.454,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp766,2 triliun.

Defisit APBN tahun 2018 direncanakan sekitar 2,19 persen terhadap PDB, atau sekitar Rp326 triliun. Angka ini turun apabila dibandingkan dengan *outlook* defisit APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2017, yaitu sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Penurunan defisit ini menggambarkan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga kebijakan fiskal secara hati-hati dan aman dengan tetap menjaga fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Fokus pembangunan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat diwujudkan antara lain dengan memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, tunjangan penghasilan guru (TPG) untuk 1,2 juta guru, dan bantuan operasional kesehatan untuk 9.767 Puskesmas. Selain itu, untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, dilakukan perluasan program perlindungan sosial, yaitu program keluarga harapan (PKH) hingga mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat.

Untuk alokasi Dana Desa, pemerintah akan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Dana Desa juga akan diarahkan untuk program padat karya (*cash for work*) sehingga masyarakat perdesaan akan diberdayakan dalam pembangunan di desanya. Dengan asumsi jumlah desa sekitar 74.000, dan akan melibatkan 200 orang per desa, maka dapat dihitung manfaat dari penggunaan Dana Desa tersebut.

Agar dapat berjalan dengan optimal, tata kelola program *cash for work* ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Walaupun hendak memberdayakan penduduk miskin di desa, namun akuntabilitasnya tetap harus dijaga agar tidak terjadi yang merugikan desa. Tantangan ini perlu dijawab dengan membuat tata kelola dan pelaporan yang sederhana dan tidak memberatkan aparat desa, namun juga transparan dalam pertanggungjawabannya, kredibel, serta tidak merugikan keuangan negara.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Apa saja bentuk nyata program bantuan sosial dari pemerintah di sekitarmu?
#OpiniAnda #MediaKeuangan

alfafa
@alfafa8888
Bantuan Pemerintah kepada para petani di Kabupaten Ngawi berupa peralatan pertanian modern, sperti mesin penanam padi, pemotong padi, dan juga alat untuk pengairan. Itu sangat membantu sekali dalam meningkatkan suplai bahan pangan terutama di pulau Jawa

Alfianto Yustinova
@FianYustinova
Adanya pembagian sembako (beras+gula) untuk warga pemilik Kartu Keluarga Sejahtera. Karena kebetulan tempat saya yg dipinjam untuk gudang sementara dan lokasi pembagian sembako di wilayah saya.

astutik kitutsa
@AstutikKitutsa
Ini pengalaman pribadi, ibu didiagnosis tumor paru2, selama kurang lebih 2 th ibu tdk menghiraukan sakitnya, tpi berkat SKM jamkesda maka ibu dpt berobat ke RS. Tdk kebayang brapa banyak biaya utk pengobatan tumor. Terimakasih, Indonesia.

Menilai Hutan

Pelayanan Penilaian sebagai salah satu tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. Salah satu obyek yang dinilai adalah Sumber Daya Alam (SDA). Invetarisasi dan penilaian dilakukan dengan menelusuri hutan. Tidak jarang anggota tim berpapasan dengan hewan buas seperti ular kobra di tengah tugasnya melakukan penilaian. Jalan menuju lokasi pun harus dilalui dengan perjuangan. Jalan yang berlumpur membuat perjalanan menjadi penuh tantangan.

Foto
Andi Al Hakim

Foto dan teks
Andi Al Hakim

Sore
di Tanjung Keramat

Anak-anak yang memang harus menikmati dunianya sebagaimana mestinya. Kehidupan anak-anak di tepi pantai penuh kegembiraan dan permainan. Seperti sore ini di Tanjung Keramat, desa nelayan yang tidak jauh dari Kota Gorontalo. Mereka bermain, melompat, dan tertawa bersama seperti tak ada beban. Kehidupan mereka sehari-hari memang tak terlalu muluk-muluk. Sepulang sekolah, mereka biasanya akan menuju pantai bersama teman-teman untuk bermain.

02/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Raih Juara Umum Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan BMN Tahun 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan Barang Milik Negara (BMN) Award kepada 33 Kementerian/Lembaga dengan 6 kategori yaitu Kategori Utilisasi BMN, Kepatuhan Pelaporan BMN, Sertifikasi BMN, Kerjasama Tata Kelola Antar Kementerian/Lembaga, Kerjasama Tata Kelola Antar Kementerian/Lembaga, dan Kinerja Terbaik Pengelolaan BMN. Pada acara yang bertemakan 'Kerja nyata optimalisasi aset negara untuk kesejahteraan rakyat' yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ini, Menkeu menyatakan *award* ini diharapkan dapat menjadi refleksi atas kinerja para pengelola BMN. "Acara ini merupakan suatu acara yang tepat untuk kita semua sebagai pemerintahan melakukan refleksi kembali atas apa yang telah kita lakukan dan yang telah dicapai," ujar Menkeu di aula Dhanapala, kantor pusat Kemenkeu pada Kamis (02/11).

Dalam penganugerahan BMN awards Pengelolaan BMN tahun 2016 tingkat K/L, K/L dikelompokkan dalam tiga kelompok menurut jumlah satuan kerja (satker). Kelompok I untuk K/L yang memiliki tidak lebih dari 10 satker, kelompok II untuk K/L yang memiliki 11-100 satker, dan kelompok III untuk K/L yang memiliki jumlah satker lebih dari 100 satker. Kementerian Keuangan termasuk dalam Kelompok III dengan jumlah 1099 satker. Menkeu meminta kepada para pengelola BMN untuk dapat memanfaatkan BMN seoptimal mungkin dan menginventarisasi BMN yang *idle* atau tidak digunakan. "Kalau BMN dalam posisi *idle* maka dia memberikan kerugian yang banyak. Satu, barang ini tiap tahun harus ada biaya pemeliharaannya. Kedua, kita kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan barang tersebut untuk kegiatan ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Pada acara ini, Kementerian Keuangan meraih juara I pada kategori Utilisasi BMN, juara III pada kategori Kepatuhan Pelaporan BMN, dan meraih penghargaan *Continuous Improvement* dalam pengelolaan BMN. Penghargaan diserahkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto. Atas capaian tiga penghargaan tersebut, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang sebagai Kementerian yang memiliki Kinerja terbaik dalam Pengelolaan BMN tingkat K/L.

26/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Selenggarakan Rangkaian Seminar Hari Oeang

Kementerian Keuangan mengadakan seminar dalam rangka Hari Oeang yang bertemakan "2030: Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Dunia Melalui Transformasi Digital dan APBN yang berdaya saing"di Aula Dhanapala Jakarta pada kamis (26/10). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, CEO Gojek, Nadiem Makarim dan Pengurus Indonesia E-commerce Association, Ignasius Untung menjadi panelis pada seminar tersebut. Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara bertindak sebagai moderator. Menkeu meyakini digital ekonomi akan berkembang pesat. Pasalnya, belanja dengan skema *online* bukan lagi merupakan gaya hidup semata, melainkan kebutuhan bagi masyarakat. "Shopping melalui online menjadi sesuatu tidak hanya lifestyle tadi menjadi kebutuhan dan menyelesaikan masalah dari sisi keterbatasan waktu, fasilitas dan yang lain-lain," ungkapnya

31/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Sekretaris Jenderal Tandatangani Nota Kesepahaman Penempatan Lulusan PKN STAN 2017

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto menandatangani Nota Kesepahaman penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di 10 Kementerian/Lembaga di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (31/10). Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen Kemenkeu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pengamanan keuangan negara. "Ini merupakan upaya kita terus bersama-sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga membangun kualitas SDM di masing-masing K/L khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Diharapkan ini menjadi pemersatu bagi bangsa kita yang majemuk yang beragam di seluruh Indonesia sehingga para lulusan bisa menjadi perekat bangsa Indonesia." jelas Sekjen.

10/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencontohkan bentuk pahlawan baru masa kini pada upacara peringatan Hari Pahlawan ke-72, Jumat, (10/11) di lapangan kantor pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Menkeu mengatakan seluruh pegawai Kemenkeu yang setia, profesional, dan penuh integritas menjaga dan mengelola keuangan negara untuk rakyat Indonesia adalah pahlawan masa kini. "Jajaran Kementerian Keuangan yang setia, profesional, dan penuh integritas menjaga dan mengelola keuangan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Mereka semua yang terus menggunakan ilmu dan kewenangannya semata-mata untuk memperjuangkan kemajuan Indonesia. Merekalah pahlawan kita hari ini," jelasnya.

Menkeu Lantik 10 Orang Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenkeu

10/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 10 orang Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (10/11). Menkeu berpesan di penghujung tahun 2017 para pejabat harus tetap fokus dalam menjalankan jabatan barunya. “Ini akhir tahun, kita akan dihadapkan pada kegiatan yang sangat padat. Jangan lupa terus bekerja secara detail. Organisasi harus diurus, visi dan misi serta tanggung jawab dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan profesional,” ujar Menkeu di aula Mezzanine gedung Djuanda I. Sepuluh pejabat tersebut yaitu dua orang dari Sekretariat Jenderal, tiga orang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tiga orang dari Direktorat Jenderal Pajak, dan dua orang pejabat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

15/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Menjadi Pembicara Acara On Boarding Kumparan.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara On Boarding Kumparan.com Batch 2 pada hari Rabu, (15/11) di Ballroom Kuningan City. Menkeu memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu dari sekian banyak tujuan yang ingin dicapai Pemerintah di dalam mengelola keuangan negara. Menkeu juga menanggapi isu yang berkembang tentang besarnya utang pemerintah, Menkeu meyakinkan bahwa pemerintah berusaha menjaga APBN tetap sehat dan bisa berdiri di atas penerimaan negara sendiri. “Pemerintah melakukan pembiayaan dengan cara hati-hati. Utang digunakan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif. Dan jika dibandingkan dengan negara lain, untuk ukuran ekonomi sebesar Indonesia, rasio utang kita adalah yang dianggap sehat dan aman,” terangnya.

04-06/12	APEC Seminar on Disaster Risk Financing in the Asia Pacific Region d Padang
05/12	Penyerahan Anugerah Dana Rakca 2017
05-07/12	Rembug Integritas Nasional di Yogyakarta
07/12	Penyerahan DIPA di Istana Bogor
07-08/12	Seminar Internasional AIFED di Bali
13-15/12	Mukernas Widyaiswara di Jakarta
13/12	Investor Gathering di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I Jakarta
/12	Kunjungan Menteri Keuangan ke KPPN di Jakarta saat Tutup Tahun Anggaran

17/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Memberikan Pidato pada Acara Program Enrichment Ekonomi & Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato tentang peran APBN dalam mewujudkan Negara Indonesia di depan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) selaku pejabat yang mewakili Kepala Polisi Republik Indonesia, para Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dan Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) seluruh Indonesia di Gedung Thamrin, kantor Bank Indonesia, Jakarta pada Jumat (17/11). Pada acara tersebut yang bertajuk “Program *Enrichment* Ekonomi & Keuangan bagi Kapolda & Kepala KPwDN BI” ini, Menkeu menjelaskan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan fiskal. Menkeu juga mengingatkan kembali tentang tujuan Negara Republik Indonesia dan setiap pihak memiliki peran untuk mendekatkan tercapainya tujuan Negara tersebut.

18/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Wamenkeu Memberikan Keynote Speech di Acara The 1st IIMF 2017

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan *keynote* speech dalam acara The 1st Indonesia International Microfinance Forum 2017 (The 1st IIMF 2017) bertempat di Gedung A.H. Nasution Magelang, Jawa Tengah (18/11). Wamenkeu menegaskan bahwa sinergi dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan di bidang *microfinance* sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Indonesia akan maju apabila bersinergi dengan daerah. Daerah ini pasti provinsi, Gubernur, Bupati, Walikota, dan pimpinan kepala Bapak/Ibu Desa. Jangan lupa peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena kita bicara kesejahteraan daerah. BPD harus banyak perannya,harus mereformasi dan juga merevolusi dirinya,” pesan Wamenkeu.

17/11

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Konferensi Pers Sosialisasi PMK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada awak media dalam konferensi pers sosialisasi (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Aula Mezzanine, Jakarta (17/11). Dengan ditandatanganinya revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Menkeu membebaskan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk keperluan balik nama atas harta berupa tanah dan/atau bangunan terkait dengan Amnesti Pajak. Menurutnya, pemberian kemudahan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

MANFAATKAN POTENSI DAN MOMENTUM EKONOMI

Setelah melewati rapat paripurna hingga dini hari, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 pada 25 Oktober 2017 lalu. Mengangkat tema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan", APBN 2018 menjadi alat bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan melalui belanja yang semakin produktif, sesuai dengan prioritas nasional.

Selaras dengan tema dimaksud, pada kebijakan APBN kali ini, pemerintah memberikan penekanan pada program kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini dimaksudkan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat Indonesia melalui sejumlah program. Baik yang terkait dengan perlindungan sosial, belanja pendidikan dan kesehatan, maupun infrastruktur.

"Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja," demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna pada Rabu, (25/10).

Beberapa asumsi makro yang disepakati dalam APBN 2018 diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, tingkat inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp13.400/USD, serta tingkat suku Bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan rata-rata USD48/barel, sedangkan untuk *lifting* minyak dan *lifting* gas masing-masing diperkirakan sebesar 800 ribu barel/hari dan 1.200 ribu barel setara minyak/hari.

Pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan sebesar Rp444,1 triliun dalam APBN 2018.

Foto
Anas Nur Huda

Manfaatkan momentum

Menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi makro dalam APBN 2018, ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, APBN 2018 cenderung optimis, tapi tetap realistis dan kredibel. Hal ini dilihat, dengan mempertimbangkan potensi perekonomian global maupun domestik. Menurut Josua, perkembangan ekonomi global pada 2018, tumbuh di kisaran 3,6-3,7 persen *year on year* (*yoy*). Negara-negara berkembang masih menjadi penopang perekonomian dunia, di tengah belum stabilnya pemulihan ekonomi negara maju.

Sejalan dengan itu, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook pada Juli 2017 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,6 persen, dengan rata-rata pertumbuhan di negara-negara berkembang sebesar 4,8 persen. Dengan demikian, lingkungan perekonomian global diharapkan mulai tumbuh dengan risiko yang terjaga.

Hal lain yang juga menggembirakan adalah capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan cenderung menguat hingga kini. Dalam Global Competitiveness Report 2017-2018, menguatnya pertumbuhan ekonomi dan fundamental makro ekonomi Indonesia, mampu menaikkan peringkat Indonesia sebanyak 5 tingkat, dari posisi 41 ke posisi 36. Beberapa perbaikan yang dilakukan Indonesia diantaranya meliputi kategori kesehatan, pendidikan dasar, insfrastruktur, makroekonomi, kesiapan teknologi, dan kepuasan bisnis.

Terkait dengan kemudahan berbisnis (*easy of doing business* 2017), peringkat Indonesia naik dari posisi 106 ke posisi 91. Hal ini membuat Indonesia berada dalam jajaran Top Improvers, berada di atas India, Brazil, dan Filipina. Sebelumnya, Indonesia juga telah mengantongi *investment grade* dari seluruh lembaga rating, seperti Standard and Poor's, Moody's dan Fitch.

Ekonomi terus bertumbuh

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir menyampaikan, perbaikan pada perekonomian global mulai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi sebesar 5,4 persen sangat mungkin dicapai jika ditopang oleh pertumbuhan yang bersumber dari konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional.

"Konsumsi rumah tangga diharapkan akan tumbuh sekitar 5,1 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diupayakan berada di kisaran 3,8 persen melalui kebijakan belanja ekspansif dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja nonprioritas," jelas Amir.

Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan, perbaikan kapasitas produksi, serta pengalokasikan subsidi yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong

Layanan kesehatan berfungsi menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan

Foto Anas Nur Huda.

sinergitas program perlindungan sosial, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berpendapatan rendah secara lebih komprehensif dan efektif.

Menanggapi hal ini, Josua menyampaikan, tingkat inflasi 2018 diperkirakan akan tetap terkendali di kisaran 3,5 persen sesuai dengan proyeksi pemerintah. Hal ini salah satunya ditopang oleh pengendalian harga komoditas pangan melalui perbaikan pasokan pangan.

"(Ini) sebagai dampak positif kebijakan pemerintah, seperti penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas beras, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembentukan tim pengendalian inflasi nasional," katanya. Program perlindungan sosial diyakini Josua juga mampu menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga daya beli masyarakat bisa tumbuh positif.

Investasi dan perdagangan internasional

Dari sisi investasi, pertumbuhan diharapkan bisa mencapai 6,3 persen. Harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, simplifikasi prosedur perizinan, dan kemudahan proses bisnis, menurut Hidayat, menjadi langkah pemerintah dalam mempercepat dan mempermudah kegiatan usaha.

Tidak hanya itu, pembangunan sejumlah proyek strategis nasional diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas nasional agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. "Untuk itu, pembangunan infrastruktur tetap akan diarahkan pada infrastruktur yang dapat mendorong produktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas serta mewujudkan pemerataan hasil pembangunan," katanya.

Terkait hal ini, Josua menilai, perbaikan pada iklim investasi, percepatan program infrastruktur pemerintah, serta reformasi struktural melalui deregulasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan, bisa menjadi jalan bagi pertumbuhan investasi yang mengalami tren positif.

Untuk kinerja ekspor, pertumbuhan diperkirakan sebesar 5,1 persen. Hidayat mengungkapkan, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekspor melalui pengembangan pasar baru yang potensial, serta peningkatan peran Usaha Menengah Kecil (UMK) yang berorientasi ekspor. Selain itu, pemerintah juga mendorong promosi produk unggulan dan destinasi wisata Indonesia, serta peningkatan pada jumlah pelaku ekspor.

"Pada sisi impor, Pemerintah akan senantiasa melakukan pengendalian dengan tetap memprioritaskan suplai dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan priortias seperti proyek infrastruktur, pangan, dan bahan baku,"katanya.

Kebijakan strategis

Menurut Hidayat, terdapat sedikitnya empat kebijakan strategis dalam APBN 2018. "Pertama, pemerintah masih menempuh kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur. Kedua, pemerintah konsisten mendorong penguatan kualitas belanja produktif melalui pengalokasian pada anggaran infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun, anggaran pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp111,0 triliun, serta anggaran program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sebesar Rp283,7 triliun,"paparnya.

Selanjutnya yang ketiga, dari sisi pembiayaan, pemerintah berupaya mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan menjaga defisit 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Pemerintah juga berupaya menjaga rasio utang dalam level aman, kurang dari 30 persen PDB, serta mendorong keseimbangan primer menuju positif (-Rp87,3triliun)," jelasnya.

Tetap realistis

Meski optimis, kebijakan APBN 2018 diyakini pemerintah masih realistis. Sebagai contoh, pada target penerimaan pajak, ditargetkan tumbuh 10 persen dibandingkan target APBN Perubahan 2017. "Jika asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 3,6 persen, maka kenaikan target (penerimaan pajak) 10 persen adalah sangat realistis," terang Hidayat.

Lebih lanjut dia menambahkan, meskipun defisit ditetapkan relatif rendah, yaitu sebesar 2,19 persen, pemerintah berupaya mempertajam dan memperbaiki kualitas belanja agar lebih efektif untuk mendukung perluasan ruang fiskal. "Belanja pemerintah akan tetap difokuskan pada belanja yang dapat mendukung program prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, serta penguatan desentralisasi fiskal, "ungkapnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selain itu, agar peran APBN lebih optimal dalam menstimulasi perekonomian, dilakukan upaya percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran.

"Hal tersebut ditempuh dengan menyederhanakan prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, penganggaran, serta pencairan dana," terangnya. Bahkan, pemerintah mendorong pendisplinan fiskal melalui penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan objektif.

Strategi Jitu

Amir menyampaikan, sejumlah strategi telah dipersiapkan pemerintah guna mencapai target APBN 2018. Dari sisi pendapatan, pemerintah melanjutkan sejumlah terobosan, diantaranya memperluas basis pajak dan database perpajakan sebagai dampak positif atas dilakukan *tax amnesty* 2017-2018, penggalian potensi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta reformasi perpajakan.

"Seperti penyempurnaan dan perbaikan regulasi perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, peningkatan penggunaan sistem informasi yang *up to date* dan terintegrasi, serta pertukaran informasi keuangan otomatis guna meningkatkan akses informasi perbankan terkait perpajakan,"ungkapnya.

Sementara dari sisi pembiayaan, guna mendorong keberlanjutan dan efsiensi pembiayaan, pemerintah berupaya dengan mengendalikan defisit dalam batas aman (2,19 persen PDB), menjaga rasio utang dalam batas *manageable* (dibawah 30 persen terhadap PDB), memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif, dan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian perekonomian.

"Pemerintah juga mengembangkan *creative financing* untuk mengakselerasi pembangunan dengan memberdayakan peran swasta, BUMN (antara lain melalui PMN, dana bergulir, dan skema KPBU) untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, "paparnya.

Teks Farida Rosadi

KEBIJAKAN UMUM
APBN 2018
REPUBLIK INDONESIA

Guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah berkomitmen menyusun dan melaksanakan APBN 2018 secara produktif, efisien, dan berdaya tahan dengan risiko terkendali. Penerimaan negara diperkuat lewat reformasi yang solid dan terukur. Belanja negara berfokus pada pemerataan pembangunan, penyelesaian proyek strategis, dan perlindungan kepada masyarakat menengah ke bawah. Sementara pengelolaan utang dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan

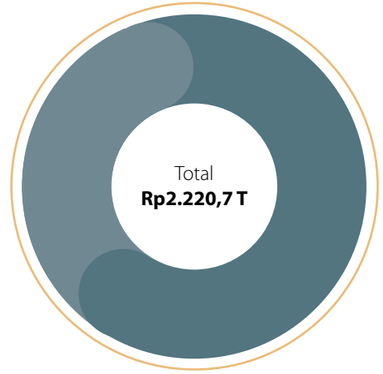

Pendapatan Negara

- Penerimaan Perpajakan **Rp1.618,1 T**
- Penerimaan Negara Bukan Pajak **Rp275,4 T**
- Hibah **Rp1,2 T**

Belanja Negara

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa **Rp766,2 T**
- Belanja Pemerintah Pusat **Rp1.454,5 T**

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

5,4 Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	**3,5** Inflasi (%, yoy)
5,2 Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)	**13.400** Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
48 Harga Minyak (US$/barel)	**800** *Lifting* Minyak (ribu barel/hari) (%, yoy)
1.200 *Lifting* Gas (MPOED)	

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAN TARGET PEMBANGUNAN

9,5-10 Target Tingkat Kemiskinan (%)	**71,5** Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5-5,3 Target Tingkat Pengangguran (%)	**0,38** Target Ketimpangan (*Gini Ratio*)

Pembiayaan

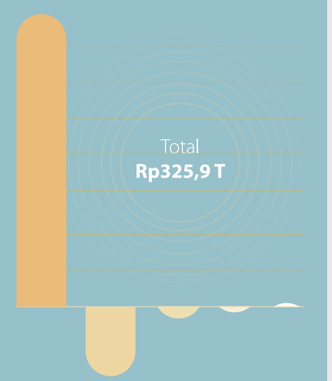

- Pembiayaan Utang **Rp399,2T**
- Pembiayaan Investasi **Rp(65,7) T**
- Pemberian Pinjaman **Rp(6,7) T**
- Kewajiban Penjaminan **Rp(1,1) T**
- Pembiayaan Lainnya **Rp0,2 T**

% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB

(2,19)

KEBIJAKAN BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat
Rp1.454,5 T

Diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas.

- Belanja K/L **Rp847,4 T**
- Belanja Non K/L **Rp607,1 T**
  antara lain: Subsidi **Rp156,2 T**

Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp766,2 T

Meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.

- **Rp89,2 T** Dana Bagi Hasil
- **Rp401,5 T** Dana Alokasi Umum
- **Rp62,4 T** Dana Alokasi Khusus Fisik
- **Rp123,5 T** Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- **Rp8,5 T** Dana Insentif Daerah
- **Rp21,1 T** Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- **Rp60 T** Dana Desa

difokuskan pada:

Pendidikan
Rp444,1 T

Sasaran target*

- **19,7 juta** siswa Program Indonesia Pintar
- **56 juta** siswa Bantuan Operasional Sekolah
- **401,5 ribu** mahasiswa Beasiswa Bidik Misi
- **61,2 ribu** pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas
- Tunjangan Profesi Guru (**435,9 ribu** guru non PNS, **257 ribu** guru PNS, **1,2 juta** guru PNSD)

Kesehatan
Rp111 T

Sasaran target*

- **92,4 juta** jiwa Program Indonesia Sehat
- **1,8 juta** jiwa Kesertaan KB
- **49** RS/Balkes penyediaan sarana berkualitas
- **92,5** persen Imunisasi (0-11 bulan)
- **74 Ribu** sertifikasi obat dan makanan

Kemiskinan dan Kesenjangan
Rp283,7 T

Program Perlindungan Sosial:

- Program Keluarga Harapan (Naik dari 6 juta menjadi **10 juta** keluarga)
- Perluasan Bantuan Pangan (**15,6 juta** keluarga)
- Pelayanan Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran **92,4 juta** jiwa)
- Pendidikan
  - **19,7 juta** siswa (Program Indonesia Pintar)
  - **401,5 ribu** mahasiswa (Bidik Misi)
- Dana Desa

Infrastruktur
Rp410,7 T*

Pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas

- **865** km jalan baru
- **25** km jalan tol
- **8.695** m jembatan
- **620** km'sp jalur KA
- **23** km'sp jalur LRT
- **8** lokasi bandar udara
- **100** lokasi desa *broadband* terbaru
- **380** lokasi BTS di daerah 3T
- **13.450** unit rusun
- **180 ribu** unit bantuan stimulan

**Angka sementara menunggu Perpres Rincian APBN 2018*

Sektor Unggulan
Rp34,8 T

- **Pertanian**
  - Peningkatan Produksi pangan dan pembangunan sarana prasarana
  - Pengembangan hortikultura
- **Pariwisata**
  - Pengembangan **10** destinasi wisata
  - Peningkatan wisatawan
  - Promosi pariwisata
- **Perikanan**
  - Peningkatan daya saing produk olahan perikanan
  - Bantuan kapal nelayan **1.048** unit
  - Kelestarian lingkungan

merupakan pagu Kementan, KKP, dan Kemenpar

Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat
Rp365,8 T

- **Peningkatan Reformasi Birokrasi** untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- **Kesejahteraan** aparatur dan pensiunan (termasuk pensiunan aparat Pemda)
- **Kenaikan** uang lauk pauk TNI/ Polri
- **Perbaikan sistem** dan manfaat pensiun aparatur negara

Pertahanan Keamanan dan Demokrasi
Rp220,8 T

- **Pertahanan**
  Pencapaian *Minimum Essential Forces* (MEF) tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan
- **Keamanan**
  Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ penyidikan pidana
- **Demokrasi**
  Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu 2019

merupakan pagu Kemenkumham, Polri, KPU, dan Bawaslu

MENGAKSELERASI PEMERATAAN EKONOMI

Program padat karya dalam APBN 2018 dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok desa.

Foto
Anas Nur Huda

Fokus pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya mendorong ekonomi yang tumbuh tinggi, namun juga menciptakan pemerataaan. Hal ini juga tertuang dalam APBN 2018 yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2017 yang lalu. Dalam APBN tersebut, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Di sisi lain, belanja negara dipatok sebesar Rp2.220,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.454,5 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. Dengan demikian, dalam APBN 2018 tersebut disepakati defisit anggaran tahun 2018 sebesar 2,19 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp325,9 triliun.

Pada kesempatan yang sama dalam sidang paripurna, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa APBN 2018 menggambarkan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga kebijakan fiskal secara hati-hati dan aman, tetapi tetap dengan menjaga fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif.

"Belanja negara diarahkan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, serta peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, melalui perluasan program perlindungan sosial, yaitu program keluarga harapan (PKH) hingga mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat. Melalui APBN, masyarakat yang adil, makmur dan bermartabat adalah tujuan kita bersama," jelas Menkeu

Akselerasi ekonomi berkeadilan

Menjawab isu kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, menjelaskan bahwa kuncinya, pertama adalah ekonomi bisa tumbuh dan stabilitas ekonomi bisa terjaga. Selain itu, menurutnya perlu adanya perbaikan di sektor konsumsi, serta perbaikan peringkat bisnis di Indonesia. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dapat merangsang dan meningkatkan investasi sehingga industri dalam negeri mampu menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Dengan adanya perubahan-perubahan struktural ekonomi dan kemudahan berusaha melalui pemangkasan perijinan di birokraksi, maka ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*) bisa diturunkan.

Menghadapi kondisi tersebut, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Kunta Wibawa, menjelaskan dalam APBN 2018 *outlook* dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 5,4 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, otomatis target penerimaan pajak juga menjadi lebih besar. Namun demikian, APBN 2018 dibuat secara realistis dan *achievable*. Di sisi lain, dari sisi belanja, pemerintah juga mendorong agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Untuk itu, belanja masih diprioritaskan untuk memacu infrastruktur. Harapannya, *high cost economy* mulai berkurang karena biaya logistik barang dari satu tempat ke tempat lain menjadi murah.

Di sisi lain, Bhima Yudhistira, ekonom INDEF mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang stabil. Namun demikian, masih terdapat tantangan dari sisi eksternal berupa kondisi geopolitik di semenanjung Korea, kebijakan moneter dari The Fed, dan fluktuasi harga komoditas. Untuk itu, menurutnya untuk tahun 2018, motor pertumbuhan yang dapat diandalkan hanya ada dua, yaitu dari sektor investasi dan ekspor. Kunci dari dua motor tersebut ada pada stabilitas politik, iklim perpajakan yang kondusif dan stimulus fiskal bagi investasi di sektor industri pengolahan.

Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

Selain fokus pada sektor infrastruktur, Direktur Penyusunan APBN, Kunta, juga menjabarkan fokus belanja tetap diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Menurutnya, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, diharapkan tenaga kerja dapat mencari pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang lebih baik. Di sisi lain, tingkat kesehatan masyarakat juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya.

Selain itu, pemerintah tetap fokus pada peningkatan perlindungan sosial. "Kita sudah mulai menuju ke arah yang tepat sasaran. Makanya, yang bantuan nontunai itu alokasi belanjanya mulai naik. Dalam arti, dulu kan subsidi itu lebih kepada subsidi harga, pelan-pelan sudah mulai kita kurangi. Sekarang 2018 itu yang rastra, bantuan beras, dulu kan bentuknya subsidi pangan, sekarang menjadi bantuan pangan," jelasnya.

APBN untuk pemerataan

Untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, Kepala KSP Teten menyampaikan beberapa arahan Presiden yang merupakan terobosan yang akan dilakukan dalam APBN 2018. Pertama adalah membuka akses lahan secara adil kepada masyarakat. Kedua adalah mempermudah akses terhadap pembiayaan, dan ketiga adalah mendorong pendidikan jalur vokasi. Selain itu, menurutnya terdapat tiga hal yang perlu diselesaikan, yakni menciptakan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, dan ketiga mengefektifkan bantuan sosial agar daya beli masyarakat menguat, serta tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN 2018 sendiri, Presiden sudah memerintahkan agar Dana Desa bisa menciptakan lapangan kerja melalui program dana desa yang dilakukan secara swakelola dan dikerjakan secara padat karya. Di sisi lain, program pembangunan infrastruktur sederhana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta program pengadaan bantuan di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga bisa dikerjakan di daerah sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kita ingin tetap pembangunan infrastruktur dilakukan. Sanitasi untuk air bersih, serta infrastruktur desa lain tetap dikerjakan, sehingga daya beli masyarakat kuat. Di samping itu, sekarang ada program yang sedang di-*push* yang mempunyai dampak pada penciptaan lapangan kerja, yaitu perhutanan sosial," jelasnya.

"Kita ingin tetap pembangunan infrastruktur dilakukan. Sanitasi untuk air bersih, serta infrastruktur desa lain tetap dikerjakan, sehingga daya beli masyarakat kuat. Di samping itu, sekarang ada program yang sedang di-*push* yang mempunyai dampak pada penciptaan lapangan kerja, yaitu perhutanan sosial,"

Teten Maduki
Kepala Kantor Staf Presiden

“Delapan belas triliun itu bisa menyerap kira-kira 400 juta hari orang kerja ya. Tinggal kalau rata-rata kerjanya 60 hari ya berarti bisa *create* sekitar 5 juta *job*. Kalau rata-rata kerja 90 hari kira-kira kita *create* 3 juta *job*,”

Eko Putro Sandjojo
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Menggerakan ekonomi perdesaan

Terkait program padat karya, Teten menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat bisa bekerja dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui skema Dana Desa yang telah ada, ataupun melalui program kementerian teknis lainnya yang memiliki program kegiatan di desa. Tujuannya adalah agar masyarakat di desa bisa memperoleh pekerjaan dan mendapat upah secara harian atau mingguan.

“Kita fokus dengan program yang ada. Bukan dari Dana Desa dialihkan ke *cash for work*. Tetap terintegrasi dalam program yang lain, tetapi nantinya yang diperlukan adalah perubahan pengelolaannya. Yang sebelumnya diserahkan ke swasta, sekarang diserahkan ke masyarakat untuk memperkerjakan orang-orang di kampung. Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri Keuangan. Satu, untuk melihat program Kementerian/ Lembaga 2018 mana yang bisa diswakelolakan dan padat karya supaya menciptakan lapangan kerja. Kedua, membuat sistem pertanggungjawabannya,” papar Teten.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, memaparkan lebih lanjut terkait skema program padat karya yang akan diterapkan dalam APBN 2018. Ia menjelaskan bahwa untuk Dana Desa tahun depan akan ditetapkan sekitar 30 persen alokasinya untuk gaji masyarakat desa yang bekerja pada proyek swakelola Dana Desa. Ia mencontohkan pembangunan jalan desa yang menggunakan *paving block* dapat menciptakan setidaknya lapangan pekerjaan untuk para pekerja konstruksi jalan, serta pekerjaan bagi buruh pembuat *paving block* dan buruh bahan material, seperti pasir dan semen. Dengan demikian, dari alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, diperkirakan akan ada sekitar Rp18 triliun alokasi Dana Desa untuk upah pekerja.

“Delapan belas triliun itu bisa menyerap kira-kira 400 juta hari orang kerja ya. Tinggal kalau rata-rata kerjanya 60 hari ya berarti bisa *create* sekitar 5 juta *job*. Kalau rata-rata kerja 90 hari kira-kira kita *create* 3 juta *job*,” jelas Eko.

Integrasi program padat karya

Lebih lanjut, Eko juga menambahkan bahwa program padat karya akan diintegrasikan dengan program-program Dana Desa yang telah berjalan sebelumnya. Setidaknya, menurut Eko ada empat program unggulan yang akan diintegrasikan. Yang pertama adalah program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Program ini pada intinya bertujuan untuk membentuk kluster ekonomi di desa. Latar belakangnya dikarenakan masih banyaknya desa yang miskin padahal di beberapa desa lainnya sudah menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi. Solusinya adalah mereplikasi bisnis model dari desa yang telah berhasil dan diterapkan ke desa yang masih miskin melalui penentuan potensi produk yang bisa diunggulkan.

Yang kedua, lanjut Eko, adalah program pembangunan embung. Sebagai negara tropis, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan proses penanaman sepanjang tahun. “Indonesia yang harusnya bisa menanam tiga kali setahun, kenyataannya cuma bisa menanam 1,45 kali setahun. Sisanya tidak bisa menanam karena musim kemarau kering. Jadi, kalau permintaan Presiden sendiri, Dana Desa 200 sampai 500 juta diminta untuk membuat embung. Dengan adanya embung, yang tadinya menanam rata-rata cuma 1,45 kali kan berarti panennya juga 1,45 kali kan. Jadi, dengan adanya embung sekarang bisa menanam tiga kali. Akhirnya dengan lahan yang sama, pendapatan masyarakat Indonesia secara nasional bisa *double* dari sektor pertanian,” jelas Eko dengan semangat.

Ketiga adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Eko, Dana Desa seharusnya bukan menjadi sumber utama pembangunan di desa, namun seharusnya hanya dijadikan sebagai stimulus. Agar desa mampu membiayai pembangunan desanya sendiri, setiap desa diharapkan mempunyai badan usahanya sendiri. Program unggulan terakhir adalah pembangunan sarana olahraga desa. Menurut Eko, dengan adanya sarana olahraga, masyarakat terutama anak-anak muda mempunyai tempat penyaluran bakat dan minatnya, sehingga para generasi muda bisa terhindar dari hal-hal yang mengarah kepada masalah sosial, seperti tawuran, narkoba, dan kelompok radikal.

Teks Abdul Aziz

GELIAT DEMOKRASI GERAKKAN EKONOMI

Menghadapi tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun dengan lebih ekspansif. Berbeda dengan APBN tiga tahun terakhir, meski anggaran infrastruktur meningkat, namun belanja sosial dan subsidi juga mendapat porsi yang lebih besar. Tak urung hal ini menimbulkan anggapan dari sebagian masyarakat bahwa APBN 2018 dirancang secara populis untuk mendukung agenda politik.

Kegiatan politik diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ritel.

Foto
Anas Nur Huda

APBN MERATA, MASYARAKAT SEJAHTERA

Kabar baik bagi Indonesia, perekonomian dalam negeri tumbuh sebesar 5,01 persen pada triwulan II tahun 2017. Di akhir tahun 2017, pertumbuhan diprediksi semakin meningkat menjadi sekitar 5,00 – 5,10 persen. Dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, pemerintah mengharapkan APBN 2018 lebih kredibel dan lebih fokus pada akselerasi ekonomi yang adil dan merata. Simak perbincangan Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengenai APBN 2018 berikut ini.

DPR telah mengesahkan RUU APBN 2018 menjadi UU APBN pada akhir Oktober lalu. Apa yang menjadi fokus pemerintah dalam APBN 2018?

Pemerintah masih melakukan kebijakan yang konsisten dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tentunya konsistensi ini penting untuk menjaga kesinambungan dari pelaksanaan yang sudah berjalan dan menjadi *guidance* bagaimana melaksanakan tahun ke-4 (2018) dan tahun ke-5 (2019). Prioritas pemerintah yang konsisten dilakukan sejak tahun 2015 yaitu pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran. Konsistensi pemerintah juga bisa dilihat dari sisi kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaannya.

Dirjen Anggaran Askolani.

Foto Anas Nur Huda.

“Konsep awalnya sudah jelas, anggaran prioritas bertujuan memperbaiki ekonomi, pemerataan hingga ke pelosok desa, dan pelayanan publik yang lebih baik,”

Askolani
Direktur Jenderal Anggaran

Direktur Jenderal Anggaran, Askolani mengatakan, prioritas APBN saat ini sudah disusun secara sistematis sejak tahun 2015. Fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. “Konsep awalnya sudah jelas, anggaran prioritas bertujuan memperbaiki ekonomi, pemerataan hingga ke pelosok desa, dan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Direktur Penyusunan APBN, Kunta Wibawa menjelaskan, seperti apapun situasi politik yang ada, setiap kebijakan pemerintah adalah sebuah pilihan. “Kita sekarang mau memilih memprioritaskan apa dulu? Infrastruktur? Konsumsi? Atau yang lain? Apapun pilihannya yang penting tata kelolanya kita jaga agar tetap sesuai tujuan bersama yaitu masyarakat adil dan makmur,” kata Kunta.

Kunta mengungkapkan, APBN 2018 mengarah pada ekonomi inklusi. Artinya, APBN disusun agar pemerataan ekonomi menyentuh 40 persen kelompok masyarakat terbawah. “Sebelumnya, secara bertahap pemerintah berupaya menyentuh 10, 20, 30 persen penduduk termiskin dan rentan miskin. Nah, sekarang kita menuju 40 persen agar mereka juga bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, kebetulan momennya adalah menjelang Pemilu,” ujarnya.

Bantuan sosial yang diberikan bukan dalam bentuk bagi-bagi uang begitu saja. Kunta mencontohkan, pada Program Keluarga Harapan (PKH) ada kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah, ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan bagi anak balita dan bagi ibu hamil. “Makanya Kementerian Sosial memiliki pendamping-pendamping di daerah untuk mengawasi,” jelas Kunta.

Demikian pula dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Program Jaminan Kesehatan Sosial. Semua orang berhak untuk sehat dan harus punya kesempatan yang sama untuk akses kesehatan yang mudah dan murah. “Tidak semua orang mampu membayar premi asuransi kesehatan, makanya dibantu pemerintah. Kalau kemudian program bantuan sosial terlihat populis, itu hanya efek sampingnya saja. Tetapi tujuan awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat,” katanya.

Senada dengan Kunta, Yoopi Abimanyu, peneliti Badan Kebijakan Fiskal mengatakan, agenda politik 2018 dan 2019 sama sekali tidak mempengaruhi penyusunan APBN. Bagaimanapun penyusunan dan pengelolan APBN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diantaranya dengan tercipta lapangan pekerjaan baru, pengentasan kemiskinan, serta berkurangnya kesenjangan.

Oleh karenanya, lanjut Yoopi, bantuan sosial harus tepat sasaran sesuai prinsip *money follow program*. “Bantuan tersebut harus dapat menciptakan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Sebab, pada akhirnya total konsumsi rumah tangga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,”ujar Yoopi.

Peluang Ekonomi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Askolani menjelaskan, kegiatan demokrasi 2018 akan berlangsung cukup masif sebab dilakukan serentak di 171 daerah. Selain itu, pada tahun depan persiapan kampanye Pemilu 2019 juga akan mulai dilakukan. “Kalau kita lihat pola yang ada selama ini, kegiatan politik pasti meningkatkan konsumsi kampanye. Misalnya saja dari pemesanan spanduk, pakaian seragam, makanan, dan akomodasi lainnya,” kata Askolani. Untuk mendukung agar pesta demokrasi berjalan aman, belanja pertahanan dan keamanan juga meningkat.

Kunta menambahkan, tanpa ada kegiatan politik pun pertahanan dan keamanan akan selalu menjadi prioritas pemerintah. “Ekonomi tidak mungkin bisa tumbuh kalau negara tidak aman. Kita tidak hanya melihat aspek Pemilu saja, tetapi dari segala sisi termasuk kondisi global saat ini. Misalnya kebutuhan pengamanan dari narkoba, terorisme, dan radikalisme. Anggaran pertahanan keamanan untuk Polri, TNI, BNN hingga BIN semuanya sudah menjadi satu paket,” jelas Kunta.

Yoopi mengatakan, jika persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berjalan aman, kegiatan politik justru dapat menjadi pengungkit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi lembaga pemerintah non rumah tangga (LPNRT) untuk kegiatan demokrasi akan meningkat mendekati saat-saat Pemilu. Misalnya saja dari konsumsi KPPU, Bawaslu, dan dana Parpol.

Teks Irma Kesuma Dewi

Apa yang perlu ditingkatkan pemerintah untuk mewujudkan tema APBN 2018 yaitu akselerasi ekonomi yang berkeadilan?

Kalau kita lihat, pola pembangunan saat ini dibuat merata. Pemerataan pembangunan ini tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa yang dilakukan oleh para Kementerian/Lembaga (K/L). Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kemudian dimediasi dengan pengalokasian belanja melalui transfer ke daerah.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menerapkan pola transfer ke daerah untuk pembangunan. Ini yang dilakukan melalui pola Dana Alokasi Khusus (DAK) ke kabupaten/kota. Selain itu, pemerataan dilakukan melalui kebijakan Dana Desa. Kebijakan ini benar-benar menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia. Sebelum ada pola Dana Desa, kita tidak yakin penyebarannya bisa merata hingga ke sekitar 74.000 desa. Saat ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp60 triliun untuk membangun sekitar 74.000 desa yang dulu mungkin tidak tersentuh. Inilah fokus pemerataan yang ditingkatkan pada APBN 2018 dan semoga di tahun 2019 semakin optimal.

Bagaimana pemerintah mengoptimalkan program bantuan sosial dalam mengurangi kesenjangan, kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja?

Bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, sektor kesehatan melalui Program Indonesia Sehat, serta perlindungan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang sekarang ada perubahan kebijakan melalui Bantuan Pangan NonTunai (BPNT).

Kombinasi ini menunjukkan adanya dukungan kepada golongan masyarakat menengah ke bawah untuk menjaga daya beli mereka dan supaya mereka bisa terangkat dari level menegah ke bawah. Selain itu, program PKH dinilai lebih efektif. Pada tahun 2017, PKH membidik enam juta keluarga miskin, itu pun meningkat dari sebelumnya 3,5 juta, maka tahun 2018 meningkat menjadi sepuluh juta keluarga.

Apa yang membedakan program Bantuan Pangan NonTunai dengan program Beras Sejahtera (rastra)?

BNPT merupakan kombinasi program rastra yang setelah dievaluasi ternyata kurang tepat sasaran. BNPT benar-benar diarahkan untuk masyarakat tidak mampu. Ditambah dengan program PKH, tentunya semakin memantapkan program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dan efektivitasnya semakin membaik di tahun 2018.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2017 sebesar 5,01 persen, seberapa optimis pemerintah bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada APBN 2018?

Tahun ini perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 – 5,1 persen. Maka tahun depan kita sudah bisa melihat tanda-tanda perekonomian kita semakin meningkat. Jika beberapa tahun sebelumnya perkembangan ekspor impor kita negatif, tahun ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Apalagi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan selama dua hingga tiga tahun ini, harapannya semoga investasi semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan dari efek belanja pemerintah yang efektif bagi pembangunan. Misalnya, daerah terisolasi yang memiliki potensi ekonomi bisa lebih didorong menjadi daerah pariwasata. Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang bertujuan memperbaiki, mempermudah, dan menyederhanakan proses ekonomi.

Sebenarnya bagaimana kondisi ketahanan ekonomi Indonesia apabila dikaitkan dengan kondisi perekonomian global saat ini?

Indonesia menerima berbagai apresiasi yang menunjukkan bahwa negara kita banyak mengalami perbaikan. Sementara banyak pertumbuhan negara lain stagnan bahkan menurun, *progress* Indonesia terbilang baik. *Investment grade* naik, pertumbuhan ekonomi bagus, inflasi rendah, ekspor meningkat, cadangan devisa makin meningkat, dan sebagainya. Pertubuhan ekonomi kita di atas 5 persen, defisit APBN di bawah 3 persen, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto di bawah 30 persen. Hal ini merupakan bentuk prestasi Indonesia dalam mengelola ekonomi di tengah kondisi ekonomi global.

Teks Pradany Hayyu

Bahasa Indonesia Itu Mudah

Ivan Lanin.

Foto
Resha Aditya Pratama.

"Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia." Demikian salah satu satu bunyi "Sumpah Pemuda", tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ivan Lanin, penggiat Bahasa Indonesia paling aktif saat ini menceritakan kepada Media Keuangan betapa istimewanya bahasa pengantar di seluruh nusantara ini.

Bagaimana posisi Bahasa Indonesia jika disandingkan dengan ribuan bahasa daerah?

Bahasa daerah itu sumber untuk memperkaya Bahasa Indonesia. *Kan* kita punya slogan "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing". Bahasa daerah perlu dilestarikan sebagai pengikat persaudaraan. Saat kita ke restoran Padang, kalau memakai bahasa minang akan beda rasanya.

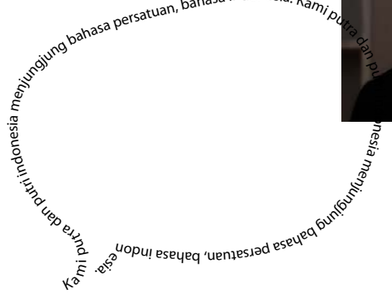

Contoh lainnya, banyak teman saya yang menjadi dokter atau tentara. Meski ditempatkan ke berbagai daerah mereka tidak khawatir, sebab mereka masih bisa berkomunikasi dengan penduduk lokal menggunakan Bahasa Indonesia.

Sekitar 90 persen penduduk kita mengerti Bahasa Indonesia. Contohnya saudara-saudara kita di Pulau Papua. Mereka memiliki ragam bahasa yang paling banyak. Antara satu kampung dengan kampung lain berbeda bahasanya. Bagi mereka yang menyambungkan ikatan mereka mereka salah satunya adalah Bahasa Indonesia.

Tidak semua bangsa menikmati karunia ini. Filipina misalnya, tidak semua penduduknya berbahasa yang sama. Begitu juga dengan Singapura atau Malaysia yang beragam bahasanya.

Mengapa kita sering mencampur penggunaan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris?

Kita tidak bisa menolak penggunaan bahasa asing. Justru kita harus menguasainya. Misalnya ada orang dari Tiongkok mau presentasi kepada saya. Ya mau tidak mau pakai bahasa Inggris, *kan*. Tetapi kita harus bisa memisahkan kapan menggunakan Bahasa Indonesia dan kapan Bahasa Inggris.

Sebenarnya kemampuan memisahkan penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris saat kita berbicara juga mencerminkan kemampuan untuk menertibkan pikiran. Ketika staf saya bilang "Pak, *meeting*nya di*cancel*," saya jadi bertanya, dari mana kamu dapat kata *meeting*?

Mengapa saya belajar Bahasa Indonesia lagi? Tahun 2006 saya menjadi pemogram komputer. Waktu itu atasan saya orang Belgia. Kami banyak berkomunikasi dengan Bahasa Inggris, sementara Bahasa Indonesia saya sangat jelek. Saya orang Indonesia tapi tidak lancar berbahasa Indonesia. Kemudian saya insaf dan belajar lagi karena merasa saya orang Indonesia tetapi tidak lancar Bahasa Indonesia.

Mengapa orang kerap malas mencari padanan Bahasa Indonesia?

Untuk kata yang gampang, saya *gak ngerti* mengapa tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang susah, ya *okelah*. Misalnya istilah *bungee jumping* terjemahannya *kan* terjun lenting. Wajar kalau memakai bahasa asing karena memang belum umum. Tetapi kalau kata yang sudah sering digunakan seperti 'daring' atau 'luring' masih ada yang tanya artinya apa, ke mana saja, *sih*? Itu kan sudah umum.

Cuma dari pengalaman saya, dari waktu ke waktu pertanyaan tentang bahasa memang akan selalu muncul. Misalnya, sampai sekarang orang masih sering tanya *kenapa* 'mempunyai' bukan 'memunyai'. Tapi orang tidak pernah tanya *kenapa 'go', 'went', 'gone'* bukan 'go', 'goed'. *Nah*, di Bahasa Inggris pun ada hal yang tidak beraturan.

Di Bahasa Indonesia ada juga pengecualian hukum KPST seperti kata 'mempunyai' dan 'mengkaji', bukan 'memunyai' dan 'mengaji'. Kemudian ada 12 'pun' yang dirangkai, seperti: 'andaipun', 'meskipun' (kata pun digabung). Sedangkan pada kata 'kapan pun' tulisan 'pun' ditulis terpisah. Selain itu ada 57 gabungan kata seperti 'kacamata', 'kasatmata', atau 'olahraga'. Hafalkan saja semuanya. Kita mau menghafalkan Bahasa Inggris, *kenapa* untuk Bahasa Indonesia tidak mau?

Sejauh mana bahasa gaul mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia?

Untuk menciptakan keakraban, bahasa pergaulan akan selalu ada pada tiap generasi. Hanya saja akan menjadi masalah jika penggunaanya merembes ke ragam formal. Kita harus sadar kapan menggunakan bahasa pergaulan dan kapan bahasa formal. Contohnya ketika bicara dengan orang yang lebih tua saya tidak akan bilang, "Itu salah tuh," tetapi pakai kata yang lebih halus misalnya "Itu kurang tepat."

Penggunaan bahasa di media sosial juga sering seenaknya. Jangan sampai karena berada dunia maya, kita lantas merasa tidak berbicara langsung dan malah kebablasan. Sopan santun, tata karma, dan norma-norma berbahasa harus tetap dijaga.

Ada banyak kosakata baru pada Bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kosakata yang hilang?

Untungnya kita punya kamus. Di kamus itu kita selalu bisa menelusuri kosakata yang hilang, biasanya ARK (arkais atau kuno) atau KL (klasik). Contohnya pernah dengar kata 'lejar', 'rudin', 'ranggit'? Sudah tidak pernah dipakai ya?

Sebenarnya manfaat kamus juga untuk merekam perbendaharaan kata. Kata kuno 'berkeledar' misalnya, artinya bersiap-siap menghadapi bahaya. Kita bisa menulis judul berita "Penduduk di Aceh sudah berkeledar untuk menghadapi tsunami." Menurut saya, justru wartawan adalah orang yang paling bisa menggunakan kata-kata yang aneh ini, coba saja digali.

> Untuk menciptakan keakraban, bahasa pergaulan akan selalu ada pada tiap generasi. Hanya saja akan menjadi masalah jika penggunaanya merembes ke ragam formal.

Banyak kosakata tua yang masih bisa dipakai. Salah satu orang yang sering memakai kata-kata yang sudah terkubur itu adalah Remi Silado. Kalau baca novel Remi Silado kening kita jadi berkerut karena dia sering menggunakan kata-kata tua. Asyik *kan*.

Penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik kini makin terkikis. Seperti apa kebijakan publik yang ideal?

Sebenarnya kita punya UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Di situ diatur bahwa semua penggunaan bahasa di ruang publik harus menggunakan Bahasa Indonesia.

Kalau kita ada tamu dari luar negeri, misalnya dalam kegiatan seminar, bahasa pengantarnya *ya* tetap Bahasa Indonesia. Untuk tamu asing apalagi jumlahnya hanya segelintir, kasih saja *headset interpreter*. Mengapa mesti mengorbankan *segitu* banyak orang Indonesia yang datang? Mestinya seperti itu. Sayangnya tidak ada sanksinya.

Upaya yang harusnya dilakukan adalah pendekatan ke Pemda. Peraturan itu harusnya diimplementasikan ke Peraturan Daerah dan dilekatkan di perijinan. Misalnya untuk memasang *billboard* atau spanduk *kan* harus ada ijin, dan ijinnya mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia. Setahu saya penegakan di daerah ini sudah dilakukan di Jakarta, Bogor, dan Bandung.

Bagaimana dengan penggunaan Bahasa Indonesia oleh tokoh publik?

Menurut saya, pidato atau ceramah di ruang publik harus menggunakan Bahasa Indonesia. Boleh saja menggunakan bahasa asing tapi tuliskan juga terjemahannya. Alasannya sederhana saja, Kita *kan* di Indonesia, *gitu lho*.

Untuk pejabat publik, apalagi di forum formal, harus berbahasa Indonesia. Meski kita sudah modern, namun secara akar budaya kita tetap butuh sosok yang digugu dan ditiru. Saat kita melihat pejabat publik bicara sembarangan atau saling cela-celaan, otomatis masyarakat akan terpengaruh. Untung Presiden kita sekarang gayanya *ndeso*, bicaranya tidak campur-campur Bahasa Inggris, *kan*.

Kalau untuk figur publik lain itu terserah mereka. Kita *kan* tidak bisa mengatur semua orang. Lagipula tidak dalam semua konteks kita harus menggunakan ragam bahasa formal. Kan aneh kalau kita ngomong ke tukang sayur, "Pak, dapatkah saya membeli cabai seikat?" Tukang sayurnya yang ada malah *bengong*. Jadi, gunakan bahasa pada waktu dan tempat yang cocok.

Seberapa berpengaruh latar belakang Teknik Kimia yang Bapak miliki terhadap aktivitas sebagai penggiat Bahasa Indonesia?

Menurut saya, satu hal yang diajarkan di teknik kimia yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berbahasa adalah tentang proses. Harus ada *input*, proses, dan *output*. Dalam bahasa pun, ketika membuat kosakata ada proses berpikirnya.

Saat ada istilah baru, kita harus mencari mencari padanan katanya. Proses mencari padanan kata itu *kan* ada alurnya. Misalnya dari '*information*' menjadi informasi, '*persecution*' menjadi persekusi, atau '*contact person*' menjadi nara hubung'. Ada pola-pola berpikir yang digunakan untuk mencari padanan kata. Proses terstruktur itulah yang bermanfaat, baik dalam teknik kimia, manajemen, maupun Bahasa Indonesia.

Teks Irma Kesuma Dewi

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF

Rumusan Ekonomi Makro Penentu Kebijakan

Dalam sebuah seminar, tampak seluruh peserta sedang memperhatikan paparan pembicara mengenai "Menjaga Kredibilitas APBN." Seminar yang diselenggarakan di Ternate itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, peneliti Badan Kebijakan Fiskal, dan ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara. Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) ini merupakan sinergi yang patut diapresiasi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah.

Tak dapat dipungkiri, keberhasilan Kementerian Keuangan merangkul para ekonom di daerah ini berkat gagasan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) yang berada di bawah Badan Kebijakan Fiskal (BKF). FEKK dibentuk tidak hanya untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, tapi juga untuk menghimpun masukan dari daerah terkait kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

PKEM merupakan unit eselon II yang bertugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, proyeksi, dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro. Dalam menjalankan fungsinya, PKEM didukung oleh lima unit Eselon III dan kelompok jabatan fungsional peneliti. Unit eselon III tersebut antara lain bidang Analis Fiskal, Analisis Neraca Pendapatan Nasional, Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, dan Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro.

Kepala PKEM Adriyanto mengungkapkan, Visi PKEM adalah Menjadi Perumus Kebijakan Ekonomi Makro yang Berbasis Kajian, Berkualitas, Antisipatif, dan Responsif. "Melalui visi ini, diharapkan PKEM dapat merumuskan kebijakan ekonomi makro yang andal, terpercaya, dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Dalam mendukung visi tersebut, PKEM memiliki visi merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, PKEM juga terlibat dalam misi pengembangan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan. Pengembangan kebijakan ini tentu dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur dan pengembangan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.

PKEM merupakan salah satu unit strategis Kementerian Keuangan dalam memberikan gambaran situasi perekonomian, termasuk melakukan identifikasi potensi dan risiko yang sedang dan akan dihadapi. Proyeksi ini sangat dibutuhkan Menteri Keuangan dan pembuat kebijakan dalam penyusunan kebijakan fiskal.

Digital Economy

Perkembangan *digital economy* merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian utama bagi PKEM. Hal ini dikarenakan potensi PKEM yang besar, namun di sisi lain membawa risiko bagi perekonomian. Dengan semakin meningkatnya penduduk Indonesia yang didominasi usia produktif, *digital economy* di Indonesia diperkirakan masih akan terus berkembang pesat.

Perkembangan ini harus mampu ditangkap sebagai potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif. Untuk itu, PKEM berkoordinasi dengan pusat-pusat lain di BKF untuk menyusun kajian awal terkait *digital economy* di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PKEM juga turut menginisiasi *High Level Policy Dialogue* (HLPD) yang bekerja sama dengan Australian National University (ANU) serta akademisi di Indonesia dan Australia. HLPD tahun 2017 merupakan penyelenggarakan HLPD ke-10. Sejauh ini, HLPD memberikan dampak yang baik pada PKEM dalam menyiapkan kebijakan. Di tahun 2018, HLPD rencananya akan mengusung tema implementasi yang sedang berjalan saat itu, seperti Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Berkumpulnya ekonom global dalam AIFED

Menteri Keuangan beberapa kali mengunjungi Pulau Dewata untuk hadir dalam berbagai seminar internasional. Seminar internasional tersebut merupakan sebuah ajang diskusi dan pertukaran informasi yang menghadirkan peserta dari berbagai kalangan baik dari dalam dan luar negeri. Diskusi yang membahas perkembangan isu terkini dan kebijakan fiskal strategis itu sebagian besar dilakukan di Pulau Bali mengingat lokasi tersebut menjadi ikon Indonesia di mata dunia.

Di awal Desember, Kementerian Keuangan yang diinisiasi PKEM akan menyelenggarakan *Annual International Forum on Economic Development and Public Policy* (AIFED) di Nusa Dua, Bali. Salah satu topik yang sedang menjadi perhatian para ekonom global adalah topik perubahan dan inovasi teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Pada penyelenggaraan AIFED ke-7 kali ini, tema yang diangkat yaitu "*Riding the waves of technological change: the way forward to drive productivity and alleviate inequality*".

Adriyanto menegaskan, tantangan dalam menjalankan tugas pasti selalu ada, tak terkecuali oleh PKEM. Meskipun secara komposisi pendidikan PKEM telah memiliki sumber daya yang baik, namun secara kuantitas masih membutuhkan tambahan. Kini Adriyatno membawahi 65 orang pegawai. Tantangan lainnya yaitu keterbatasan data untuk analisis; perkembangan ekonomi, sosial, politik, baik global dan domestik sangat dinamis; pembahasan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Rancangan APBN dengan legislatif sangat dinamis.

Dengan tantangan tersebut, PKEM optimis untuk menghadapi tahun 2018 dengan kinerja yang lebih baik. Beberapa target dan sasaran strategis yang ingin dicapai ke depan antara lain tersusunnya rekomendasi angka asumsi dasar ekonomi makro yang lebih kredibel dan akurat, tersusunnya rekomendasi kebijakan di sektor moneter dan neraca pembayaran, tersusunnya rekomendasi kebijakan dan analisis neraca pendapatan nasional, dan terjaganya kesinambungan fiskal jangka menengah.

Teks Pradany Hayyu

High Level Dialogue Policy antara Kemenkeu dengan ANU.

Seminar FEKK 2017 di Palu.

Foto
dok. Biro KLI

Meneladani Elan Transformasi STAN

Rahmadi Murwanto, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN

Pemuda lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu berdiskusi khusyuk dengan temannya. Hari itu adalah hari kelulusannya. Kali ini, ia dan temannya harus menimbang dengan khidmat setiap keputusan yang akan mereka ambil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka bimbang memilih antara sekolah di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi kedinasan. Semasa SMA, pemuda itu sudah terbiasa bekerja sambilan untuk membantu membiayai biaya sekolahnya sendiri. Pasca kelulusan, ia pun diterima di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung.

Foto
Anas Nur Huda

Sosok pemuda itu juga masih mencoba tantangan untuk masuk ke salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang kini berubah menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Berbekal dukungan kedua orang tuanya, ia pun memilih sekolah yang memiliki ikatan dinas di bawah Kementerian Keuangan tersebut sembari meluruskan niat untuk mengabdi kepada negara. Sosok pemuda itu adalah Rahmadi Murwanto yang kini telah berhasil menjabat sebagai Direktur PKN STAN. Ia kini tengah memimpin kampus almamaternya untuk bertransformasi menjadi *corporate university*.

Payung hukum baru PKN STAN

Sebagai salah satu lulusan terbaik PKN STAN dalam angkatannya, ia ditempatkan di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan yang saat ini telah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Meniti karier di kampus almameternya, Rahmadi pertama kali diberi tugas menjadi asisten dosen. Dari hal tersebut, ia merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuannya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, ia pun menempuh program magister di Weatherhead School of Management di Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2001. Enam tahun berselang, ia melanjutkan ke jenjang doktoral di Victoria University of New Zealand dan lulus pada tahun 2010. Sekembalinya dari program doktoralnya, ia diberikan tugas untuk menjadi Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja di Pusdiklat Bea dan Cukai Rawamangun. Di tempat baru ini, ia melakukan perbaikan pada kerangka evaluasi sistem diklat yang telah ada. Untuk merealisasikannya, ia bekerja sama dengan bagian kepegawaian seluruh unit untuk menerapkan model evaluasi diklat berstandar internasional yang dikenal dengan nama model *Kirkpatrick*.

Tak lama berselang, ia dipindahtugaskan kembali ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana BPPK untuk meredefinisi konsep diklat dalam kerangka transformasi kelembagaan. Di sini ia melihat posisi STAN yang strategis sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, namun masih membutuhkan payung hukum yang lebih tegas dan jelas. Untuk itu, ia melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ia bersyukur setelah beberapa puluh tahun, akhirnya ia berhasil memberikan *legal standing* terhadap almamaternya dengan mengubah bentuk lembaga STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Dengan begitu, posisi PKN STAN menjadi institusi pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.

Corporate University

Selain meredefinisi payung hukum dari PKN STAN, Rahmadi juga berperan aktif dalam menyusun konsep reposisi ulang dari BPPK. Di sini, ia mengusulkan agar diklat atau *training* dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengisi *gap* antara kebutuhan kompetensi pegawai di institusi dengan standar kompetensi yang diberikan dalam diklat. Hal itu bertujuan agar strategi organisasi dapat berjalan dengan baik karena sumber daya manusianya sudah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat dua pilar dari *corporate university*. Pilar yang pertama adalah *knowledge management*, yakni merangkum pegetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang berprestasi untuk dapat ditularkan kembali kepada pegawai yang lain. Yang kedua adalah *learning organization*. Pada pilar ini, kesulitan yang paling utama pada level organisasi adalah membuat setiap individu mau berperan serta dalam melaksanakan hasil monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan perbaikan organisasi.

"Jadi kalau kita bicara *corporate university* itu, kita mau bangun cuma memang ada tahapan-tahapannya. Kita tahapannya sekarang kan *awareness*. Supaya mereka mulai tahu, mulai berbagi, dan sebagainya," ungkapnya.

Belajar dari mana saja

Rahmadi banyak terinspirasi dari kedua orang tuanya. Dari ayahnya, Darmo Suwito, ia belajar untuk hidup mandiri. Dengan kondisi ekonomi yang sederhana, Rahmadi harus mampu mengatur pola keuangannya sedari kecil. Bahkan, ia juga sering bekerja sambilan untuk membantu biaya sekolahnya sendiri. Selain itu, ayahnya yang berprofesi sebagai pengrajin mebel juga mengajarkan nilai bekerja keras dan kejujuran. Di sisi lain, ayahnya juga mengajarkan nilai kebersamaan yang melekat pada diri Rahmadi hingga kini. Pada masa kecil, ia tinggal dengan sembilan saudaranya. Agar adil dan mandiri, ayahnya membagi tugas dan kewajiban secara merata kepada semua anak-anaknya. Setiap anak diberikan giliran untuk menyiapkan makanan, menyuci piring, menyuci baju, dan menyapu.

Begitu pun dengan ibunya, Murtini, yang mengajarkan nilai bahwa belajar tidak harus dilakukan di sekolah. Ibunya merupakan sosok pembelajar sejati. Meski ibunya tidak pernah belajar di sekolah formal, ibu Rahmadi mampu membaca dan berhitung secara mandiri. Hal itu pula yang menginspirasi Rahmadi untuk belajar Bahasa Inggris sendiri. Hasilnya, ia pun berhasil menembus persaingan ketat beasiswa ke Amerika dan Selandia Baru dengan perjuangannya sendiri.

Rahmadi Murwanto beserta keluarga.

Foto dok. Pribadi

Kebersamaan

Untuk urusan keluarga, istrinya, Adriana Karolina Butter, dan kedua anaknya, Samuel Adrian Murwanto dan Jonathan Andreas Murwanto, merasa bersyukur, suami dan ayah mereka ditugaskan di PKN STAN. Pasalnya, berkat penempatan tersebut, Rahmadi bisa menghemat waktu dua sampai tiga jam sehari karena jarak tempuh rumahnya yang cukup dekat. Pada penempatan sebelumnya, ia harus menempuh waktu perjalanan hampir tiga jam pulang pergi untuk mencapai kantornya di Rawamangun Jakarta Timur. Selain itu, ia selalu menyempatkan mengantar anaknya ke sekolah di pagi hari. Ia juga rutin selalu menyempatkan sarapan bareng bersama keluarga sebelum beraktivitas. Dengan begitu, komunikasi dan interaksi dengan keluarga tetap terjalin dengan baik.

Sementara itu, apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan sampai malam, Rahmadi meminta anak-anaknya untuk datang ke kantornya. Hal itu dilakukannnya agar ia bisa membantu anak-anaknya mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Terkadang pada hari Sabtu dan Minggu ia juga membawa keluarganya ke kampus lantaran ia juga harus menghadiri kegiatan kampus yang diselenggarakan di akhir pekan. Dengan begitu, istri dan anak-anaknya akan selalu merasakan kehadirannya sebagai sosok kepala keluarga.

Harapan

Rahmadi terinspirasi untuk mentransformasi STAN agar bisa menjadi *Harvard*-nya Indonesia di bidang keuangan negara. Bahkan ia berharap agar nama Politeknik pada PKN STAN dapat diubah menjadi Universitas. Untuk merealisasikan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Ia harus bisa menemukan kombinasi sumber daya manusia yang berani untuk bermimpi dan memikul tanggung jawab besar.

Bagi diri sendiri, Rahmadi memiliki harapan untuk mengimplementasikan ilmunya di bidang manajemen kinerja. Ia bercita-cita untuk memperbaiki tata kelola kinerja di pemerintahan. Ia ingin menjadi dosen dan membuat buku atau kajian terkait hal tersebut. Selain itu, sebagai pendidik, ia ingin agar pendidikan mahasiswa tidak hanya berkutat untuk mencari ilmu, tetapi bagaimana bisa membuat mereka bersemangat untuk mengabdi dan membangun negara.

"Istilah saya itu kita bisa menyentuh jiwa-jiwa mereka, menyentuh perasaan mereka, menyentuh emosi mereka, sehingga mereka begitu bersentuhan sama kita tiba-tiba seperti ada percikan api semangat. Ini yang saya rasa bisa membuat negara ini bisa menjadi besar," tutupnya.

Teks Abdul Aziz

Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Penurunan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah disinyalir menjadi penyebab penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Foto
Anas Nur Huda

"Kita harus mendesain openness perekonomian dengan baik, dimulai di tingkat regional dan di sektor yang membawa manfaat bagi seluruh negara ASEAN."

Sesuai indikator Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya menuju 5,06 persen (*year on year*) pada akhir kuartal ketiga 2017. Peningkatan ini terutama dipicu oleh pertumbuhan investasi 7,1 persen, dan perdagangan internasional dimana ekspor dan impor masing-masing tumbuh 17,3 persen dan 15,1 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi masyarakat cenderung stabil pada 5,0 persen. Meski terdapat sejumlah risiko, investasi dan perdagangan diperkirakan dapat terus menjadi *drivers* pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Performa konsumsi masih perlu ditingkatkan

Selama dua kuartal terakhir 2017, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh stagnan pada 5,0 persen (*year on year*). Apabila diuraikan lebih jauh, terdapat penurunan pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 4,98 persen pada kuartal sebelumnya, menjadi 4,93 persen. Konsumsi LNPRT yang justru tumbuh cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan perayaan Idul Adha dan kegiatan partai politik jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa kota besar.

Penurunan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah disinyalir menjadi penyebab penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung tetap solid. Penurunan konsumsi masyarakat kelas menengah sejalan dengan sejumlah data yang menunjukkan adanya indikasi *consumption smoothing*. Data-data tersebut salah satunya terkait perilaku konsumen yang lebih inelastis terhadap kegiatan promosi. Ke depan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,2 persen (*year on year*), konsumsi rumah tangga diharapkan dapat bertumbuh di atas 5 persen.

Investasi bertumbuh tinggi

Pertumbuhan Indikator investasi, yaitu PMTB, tumbuh cukup tinggi di kuartal ketiga 2017, terutama pada komponen bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Peningkatan pertumbuhan yang terjadi selama beberapa kuartal berturut-turut ini mengindikasikan mulai stabilnya peran investasi sebagai akselerato pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan perkembangan indikator realisasi investasi asing langsung yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menarik bagi negara-negara lainnya.

Kontributor terbesar dari investasi asing ke Indonesia adalah Singapura (30 persen), Jepang (13,3 persen), Tiongkok (9,6 persen), dan Amerika Serikat (7 persen). Pertumbuhan yang meningkat ini juga menunjukkan adanya pengaruh postif dari implementasi kebijakan untuk mengakselerasi proses perizinan bisnis. Dengan terus dilaksanakannya kebijakan ini, diharapkan minat investasi ke Indonesia terus stabil dan meningkat.

Ke depannya, investasi masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terutama setelah direkognisinya reformasi struktural Indonesia, sehingga meningkatkan beberapa indikator terkait, seperti kemampuan membayar kredit, kemudahan berusaha, kepercayaan terhadap pemerintah, serta daya saing.

Saat ini Indonesia memegang predikat layak investasi dari seluruh lembaga rating baik Moodys, Fitch, dan Standard & Poor's. Sementara terkait kemudahan berusaha, Indonesia *Ease Of Doing Business* (EODB) index saat ini meningkat 19 peringkat, menuju 72. Posisi ini berada di atas Tiongkok, Brazil, India, dan Filipina. Dari sisi kepercayaan terhadap pemerintah, OECD *survey* memberikan peringkat Indonesia dan Switzerland sebagai negara dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang tertinggi. Terakhir, *global competitiveness index* Indonesia juga naik sebanyak 5 peringkat.

Meskipun positif, terdapat beberapa *downside risk* terhadap peningkatan investasi. Salah satunya berasal dari menyempitnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang pada Oktober 2017 dipertahankan pada 4,25 persen. Meski telah di-*cut* sebanyak dua kali, yaitu pada Agustus dan September sejumlah 50 basis poin total, kenaikan volatilitas Rupiah pada Oktober telah memperkecil ruang untuk pemotongan lebih jauh. Kenaikan volatilitas ini didorong oleh keluarnya dana asing dari investasi portofolio yang meng-*offset* dampak positif dari surplus neraca perdagangan.

Keluarnya dana asing, terutama dari pasar saham, telah menurunkan cadangan devisa sebesar hampir 3 miliar dollar AS menjadi sekitar 126,5 miliar dollar AS hanya dalam satu bulan. Hal ini terjadi setelah akumulasi devisa mencapai level tertinggi di bulan sebelumnya. Keluarnya dana asing disebabkan oleh antisipasi investor keuangan terkait kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang sangat akomodatif terhadap kebijakan fiskal yang diperkirakan ekspansif. Ekspansifnya kebijakan fiskal akan memicu perbaikan ekonomi AS lebih cepat, sehingga meningkatkan urgensi peningkatan suku bunga acuan *Fed* (*Fed rate*).

Selain *Fed rate* yang akan mendorong peningkatan aliran dana ke AS, dampak kebijakan *Fed* lain terhadap Indonesia, seperti penurunan neraca *Fed*, juga perlu dipantau. Rupiah menurun 0,3 persen (*month to month*) pada bulan Oktober 2017 menuju Rp 13.609 per dollar AS. Ini merupakan posisi terlemah sejak Juni 2017 lalu.

Momentum konsumsi pemerintah terbatas

Meskipun pertumbuhannya meningkat menuju 3,5 persen (*year on year*) didorong oleh tingginya realisasi seluruh belanja, baik belanja barang maupun bantuan sosial. Terdapat keterbatasan bagi pemerintah untuk meningkatkan komponen ini guna mendorong pertumbuhan. Hal ini disebabkan pemerintah menjaga risiko pelebaran defisit yang bersumber dari tantangan struktural penerimaan negara, terutama perpajakan. Tantangan tersebut terlihat dari *tax ratio* (penerimaan pajak terhadap PDB) yang pada beberapa tahun terakhir masih berada dalam tren penurunan, meskipun secara tahunan penerimaan pajak tetap bertumbuh positif. Selain itu, tingkat *tax ratio* juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, sehingga perlu terus ditingkatkan.

Meskipun pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui reformasi penerimaan negara, seperti perluasan basis pajak dan penyederhanaan administrasi perpajakan melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait, akselerasi konsumsi pemerintah tetap terbatas di tahun ini di tengah tingginya kebutuhan pembangunan. Reformasi perpajakan diperkirakan akan lebih terlihat hasilnya pada jangka yang lebih panjang.

Pertumbuhan perdagangan internasional

Ekspor dan Impor melanjutkan *rebound* dan memiliki peluang untuk kembali menjadi *driver* perekonomian. Hal ini sejalan dengan perbaikan harga komoditas khususnya minyak dan gas sejak kuartal keempat 2016, di samping permintaan negara mitra dagang. Hal tersebut menjadikan surplus neraca perdagangan internasional Indonesia hingga September 2017, melebihi surplus neraca perdagangan di tahun 2016. Sampai dengan akhir 2017, pertumbuhan ekspor dan impor diharapkan tetap berada di atas 10 persen (*year on year*), sehingga surplus neraca perdagangan di akhir 2017 bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Terus jadi fokus

Sebagaimana bisa dilihat dari peningkatan EODB, beberapa kemudahan, termasuk dalam hal memperoleh akses ke infrastruktur dan perdagangan lintas batas negara, turut menaikkan peringkat EODB Indonesia. Hal ini berdampak pada dua hal, yaitu infrastruktur dan perdagangan internasional sebagai potensi *driver* perekonomian ke depan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Calderon and Severon (2007), peningkatan stok infrastruktur sebesar 1 standar deviasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3 *percentage points*. Namun demikian, saat ini infrastruktur masih terkendala *tax ratio* yang masih relatif rendah, sehingga membutuhkan paritisipasi sektor swasta.

Perdagangan internasional, di sisi lain, menunjukkan *solid growth* sejak 2016 yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia naik perlahan. Tantangan perdagangan internasional ke depan adalah penurunan aktivitas perdagangan dunia yang masih belum baik dilihat dari PDB dan investasi yang masih berada dalam tren penurunan. Strategi pemerintah seperti melakukan diversifikasi produk ekspor, mendorong ekspor oleh UMKM, dan memprioritaskan impor hanya untuk program strategis pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat terus dilangsungkan guna meningkatkan perdagangan internasional ke depan.

Teks Adelia Pratiwi
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

Dr. Chatib Basri
Thee Kian Wie Distinguished Visiting Professor at the Australian National University

Openness (keterbukaan) perdagangan dan investasi adalah salah satu gerbang yang harus tetap dijaga meskipun tidak *at all cost*. Kebebasan berdagang dan berinvestasi dapat menciptakan kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terkait *trade*, perlu dicermati bahwa dampak *protectionism policy* tidak hanya dalam kebijakan tarif, tetapi juga nontarif. Berdasarkan data terakhir, pembatasan liberalisasi perdagangan melalui kebijakan non tariff (*Non Tariff Barrier*) mengalami peningkatan tren. Beberapa penelitian juga memperlihatkan adanya dampak peningkatan harga beberapa barang karena kebijakan perdagangan. Dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional, perlu diperhatian konsep *free trade versus fair trade*.

Indonesia dengan kondisi di tengah meningkatnya tendensi deliberalisasi perdagangan, perlu menjaga dan mendorong performa perdagangan internasional melalui *strategi regionalism* dengan negara-negara ASEAN. Hal tersebut disebabkan kenyataan bahwa negara-negara ASEAN masih membutuhkan pertumbuhan di berbagai bidang. Di tingkat implementasi, inisiatif ini harus dimulai dari sektor yang memberikan manfaat merata kepada seluruh sektor lainnya, seperti infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

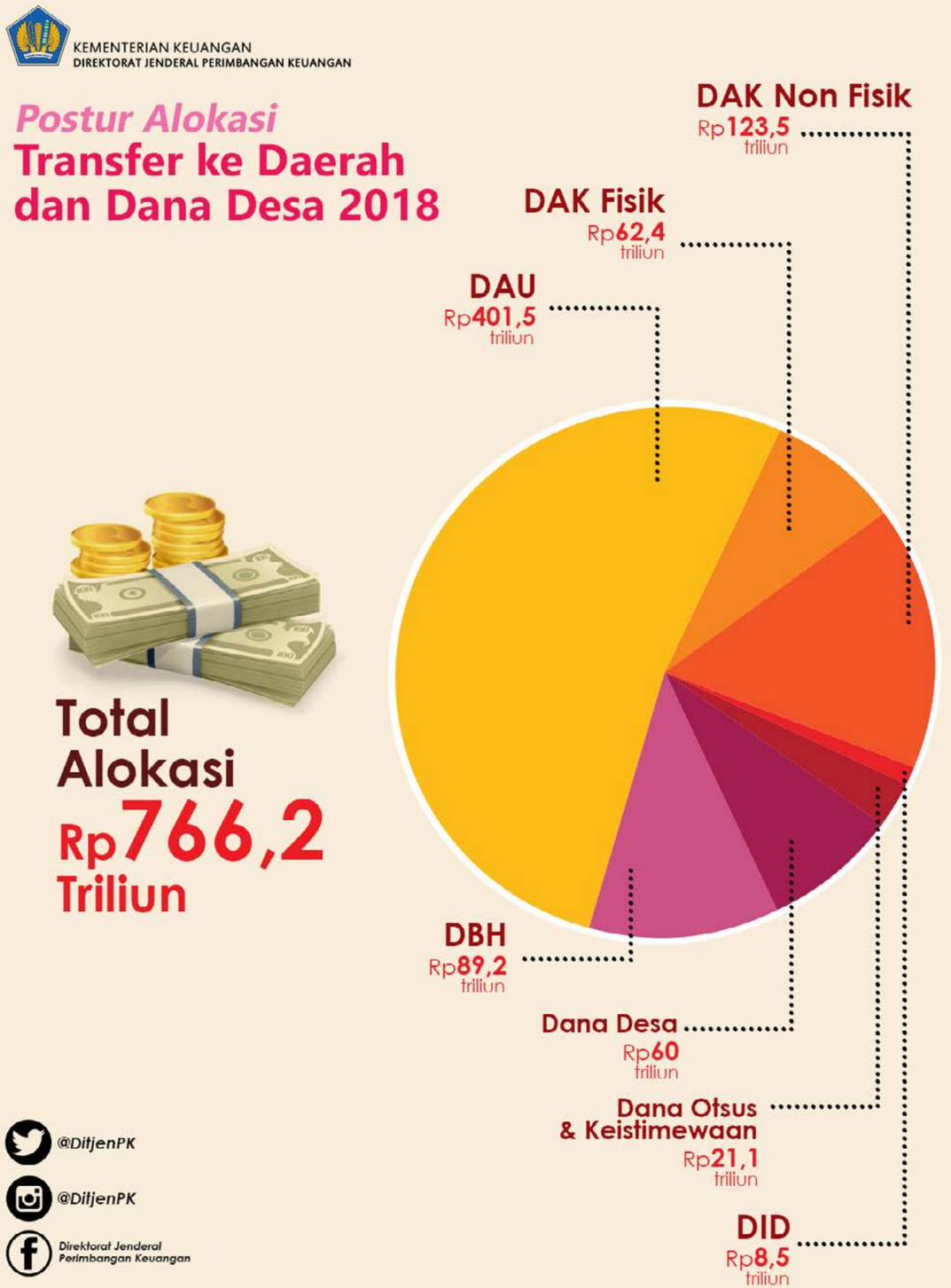

Reformasi Struktural Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Teks Mahpud Sujai,
*Peneliti Madya, PKPPIM, BKF, Kementerian Keuangan *)*

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global selama satu dekade terakhir membuat kondisi perekonomian di beberapa kawasan di dunia ikut melemah. Bahkan, beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika Latin mengalami resesi ekonomi. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut menuju ke arah negatif. Kondisi ini menyebabkan beberapa lembaga kerjasama multilateral berinisiatif menyusun sejumlah strategi, guna meningkatkan pertumbuhan. Salah satunya adalah *Going for Growth Strategy*.

Pertama kali diluncurkan pada 2005, inisiatif *Going for growth strategy* hingga saat ini masih mengalami perbaikan bertahap. Beberapa area kebijakan yang mempengaruhi pertumbuhan secara positif terus dikembangkan. Misalnya, isu pemerataan (*inclusiveness*), perubahan iklim, stabilisasi, defisit anggaran, serta neraca eksternal yang telah diberikan porsi lebih mendalam. Namun, terdapat beberapa isu baru yang muncul akhir-akhir ini, seperti inovasi, keterbukaan, dan digitalisasi.

Reformasi struktural

Reformasi struktural yang ingin dicapai dalam program *Going For Growth* menjadi lebih komprehensif karena mencakup banyak sektor. Studi yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang *Going For Growth* ini, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung integrasi antara strategi pertumbuhan dengan isu pemerataan. Sebab, pertumbuhan dan pemerataan menjadi tujuan pemerintah yang tercantum dalam Nawacita dan perlu dicapai secara bersamaan. Keduanya harus berada dalam kerangka kebijakan terpadu, sehingga memudahkan pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas kebijakan. Selain itu, pemerataan juga menjadi isu yang sangat mendasar dalam kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia.

Salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhan adalah dengan melakukan reformasi struktural yang disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Reformasi struktural dalam *Going for Growth Framework* mengidentifikasi rekomendasi kebijakan berdasarkan kemampuan pertumbuhan. Hal ini untuk memperbaiki standar kehidupan masyarakat di suatu negara dalam jangka panjang. Pengukuran kinerja yang menjadi acuan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang didekomposisi menjadi saluran produktivitas dan pemanfaatan tenaga kerja.

Indonesia telah melakukan beberapa reformasi struktural sesuai prioritas pencapaian tujuan pembangunan. Dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan inovasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pusat inovasi. Tujuan ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, penting bagi Indonesia untuk mereformasi perekonomiannya, sehingga bergerak maju dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis pengetahuan. Nilai tambah dari sumber daya alam yang tersedia perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai dukungan teknologi dan inovasi, sehingga meningkatkan nilai jual, menciptakan lapangan kerja baru yang lebih terdidik, dan memperkuat struktur industri sumber daya.

Knowledge economy

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi struktural secara signifikan. Caranya dengan meningkatkan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge economy*). Beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah antara lain dengan membuat beberapa kebijakan yang mendorong inovasi melalui pengembangan teknologi dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM), seperti peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan (*Research and Development*).

Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja, mengatur bisnis dan investasi yang memanfaatkan sumber daya mentah secara langsung, serta mendorong bisnis dan investasi yang meningkatkan nilai tambah sumber daya. Selain itu dilakukan peningkatan infrastruktur dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), serta membentuk sistem inovasi nasional.

Pemerintah Indonesia juga mempromosikan ekonomi digital dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang *e-commerce roadmap* atau peta jalan perdagangan digital. Hal ini dilakukan guna mendorong perluasan dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan dapat terhubung secara global. Peta jalan *e-commerce* juga dapat mendorong terciptanya inovasi, penemuan, dan kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut meliputi sejumlah kebijakan. Pertama, kebijakan dukungan pembiayaan bagi pemula, usaha kecil dan mikro, *start up company* dan *fintech*. Kebijakan tersebut seperti hibah untuk bisnis *start up*, pembiayaan dengan bunga rendah untuk menyewa *developer platform*, *angel capital* dan juga *crowdfunding*. Kedua, kebijakan perpajakan dan insentif bagi usaha kecil dan

pemula. Ketiga, perlindungan konsumen. Keempat, peningkatan pendidikan publik dan sumber daya manusia dengan mempromosikan kampanye kesadaran *e-commerce*, program inkubator nasional, kurikulum e-commerce dan pendidikan e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegakan hukum.

Kebijakan kelima yaitu memperbaiki sistem logistik melalui pemanfaatan Sistem Logistik Nasional, penguatan peraturan daerah, penguatan perusahaan kurir nasional, pengembangan data logistik usaha kecil menengah, serta pengembangan logistik dari desa ke kota. Keenam, memperbaiki infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband yang lebih lebar. Terakhir, meningkatkan *Cyber Security* dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam *e -commerce transaction*, kesadaran masyarakat tentang *cybercrime*, dan sertifikasi untuk keamanan data konsumen.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menyebabkan sejumlah sektor ikut terkena dampaknya, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja. Otomatisasi mesin dan teknologi komputer mengakibatkan peran manusia semakin tergantikan, terutama di sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan menyerap lebih banyak lapangan kerja. Hal ini pula yang mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural dengan menggiatkan pengembangan perekonomian di sektor jasa, terutama pariwisata.

Leisure Economy

Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu andalan pemerintah sebagai motor pertumbuhan (*engine of growth*) dan pendulang devisa. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, saat ini sektor pariwisata berada di posisi kedua sebagai penghasil devisa terbesar nasional, setelah kelapa sawit (CPO). Diproyeksikan pada 2019 mendatang, sektor pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar.

Pada 2016, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai sekitar USD13,5 miliar per tahun, atau berada di posisi kedua setelah CPO yang menyumbang devisa sebesar USD15,9 miliar per tahun. Sebelumnya pada 2015, sektor pariwisata masih berada di posisi keempat sebagai penyumbang devisa terbesar setelah CPO, minyak bumi dan gas, dan batubara. Pesatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan, serta anjloknya harga komoditas menjadikan pariwisata sebagai salah satu andalan penerimaan devisa bagi negara.

Menyadari hal ini, pemerintah terus berupaya mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pada 2017, kunjungan wisatawan ditargetkan naik menjadi sekitar 15 juta dari sebelumnya sekitar 12 juta wisatawan pada 2016. Bahkan, pada 2019 ditargetkan mencapai 20 juta wisatawan. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas ke lokasi wisata, seperti pembangunan jalan, bandara, jalan tol, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur lainnya.

Terobosan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas bebas visa ke banyak negara yang memiliki potensi sebagai sumber guna menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai destinasi baru, atau lebih dikenal dengan sepuluh Bali baru. Hal ini sebagai upaya untuk mendiversifikasi kunjungan wisatawan agar tersebar lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Muara dari berbagai reformasi struktural yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya, peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan pekerjaan dapat terwujud bagi seluruh lapisan masyarakat, menuju negara Indonesia yang maju, sejahtera, dan merata.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

Pendidik Berprestasi, Kaya Kontribusi

Di tengah kualitas pendidikan Indonesia yang belum menggembirakan, sosok pengajar visioner menjadi kemewahan yang begitu berharga. Berbincang dengan sosok Agus Muhtar, menumbuhkan optimisme bahwa di masa depan, pendidikan Indonesia bisa lebih baik lagi.

Agus–demikian dia dipanggil– merupakan sosok pengajar berprestasi yang kaya kontribusi. Lewat beasiswa dari Lembaga Pengelolan Dana Pendidikan (LPDP), Agus memilih bidang ilmu fisika guna melanjutkan jenjang pendidikan pascasarjana di Universitas Gajah Mada. Tidak main-main, kesungguhan Agus dalam menjalani pendidikan tampak dari pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang nyaris sempurna. Bahkan, tesis yang disusunnya dinilai bermanfaat bagi negara, sehingga dianugerahi Tangguh Award dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2016 lalu.

Terlanjur jatuh hati

Terdapat alasan kuat dibalik pilihan Agus mengambil jurusan fisika. Selain linier dengan bidang yang sebelumnya diambil pada masa sarjana, kecintaan pemuda berusia 35 tahun ini pada ilmu sains tidak perlu diragukan.

Sejak bangku sekolah dasar, Agus cilik begitu berminat pada sains dan ilmu pengetahuan. Lewat buku-buku di perpustakaan, Agus banyak menghabiskan waktu melahap habis buku yang tersedia. Datangnya koleksi buku baru, menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Tidak heran, semasa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Agus telah menciptakan permainan aplikatif yang didasarkan pada ilmu fisika sederhana. “Misalnya roket korek api dan prinsip aerodinamis dari anak panah,” kisah pria kelahiran Purworejo ini.

Agus menyadari, fisika menjadi bidang imu yang kurang diminati. Hal ini cukup beralasan, sebab menurutnya, Fisika yang diajarkan di sekolah hanya sebatas akumulasi pengetahuan teori dan perhitungan matematis. “Penguasaan terhadap konsep, internalisasi nilai dan sikap, serta pembentukan karakter sains siswa (melalui bidang ini), jarang diajarkan,” jelas Agus. Itu sebabnya, lanjut Agus, para siswa tidak terbiasa berpikir kritis dan inovatif.

Padahal, menurut Agus, perkembangan dunia sains dan teknologi sudah semakin pesat. Aplikasi fisika sudah jauh berkembang pada teknologi terapan yang bermanfaaat bagi masyarakat dan negara.“Kita butuh lebih banyak generasi muda Indonesia yang peduli akan ilmu pengetahuan dan sains,”ungkapnya.

Berdaya dan berprestasi

Sebelum masa menjalani beasiswa pascasarjana, Agus banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Mulai dari pengajar, relawan, hingga pembicara pada berbagai konferensi dan seminar nasional maupun internasional. Sejumlah karya ilmiah dalam bidang sains dan pendidikan juga banyak dia lahirkan.

Pesatnya perkembangan dunia sains diyakini Agus membutuhkan inovasi dalam pendidikan. Ikut dalam kompetisi di tingkat nasional, ASEAN, hingga internasional menjadi cara Agus untuk terus termotivasi. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih Agus diantaranya International Leaders in Education di Amerika Serikat, Whiteboard Animation Competition Tingkat ASEAN, Penghargaan Tangguh Award tingkat Nasional, serta Inovasi Pendidikan pada Simposisum Guru Tingkat Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agus juga aktif dalam berbagai komunitas dan kegiatan sosial masyarakat yang umumnya tidak jauh dari perannya sebagai pendidik, misalnya program desa binaan, yayasan buku, relawan pendidikan, komunitas komputer, dan masih banyak lagi. Melalui kegiatan sosial, Agus belajar sisi lain kehidupan yang dinilai sangat berharga. “Dari situ saya tergerak untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di manapun saya tinggal,”tekad Agus.

Jatuh bangun

Dalam meraih beasiswa LPDP, Agus menjalani tantangan yang tak mudah. Bidang ilmu komputer adalah pilihan pertama Agus untuk melanjutkan pendidikan guna mendukung perannya sebagai pengajar sekaligus relawan. Namun Tuhan berkehendak lain. Agus mengalami kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada pecahnya tempurung lutut sebelah kanan. Akibatnya, Program Martikulasi Pra-S2 Ilmu Komputer sebagai syarat untuk memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA), gagal dia ikuti.

Agus Muhtar.

Agus saat menerima Tangguh Award dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2016.

Foto
dok. pribadi.

Nyaris saja, tenggat satu tahun yang diberikan LPDP dalam memperoleh LoA gagal dia penuhi. Agus pun mengubah strategi dengan mengambil jurusan lain yang linier dengan pendidikan sarjananya, yaitu ilmu fisika. Beruntung, UGM masih membuka pendaftaran mahasiswa baru.

“Dalam kondisi sakit, saya dibopong ke lantai 3 untuk mengikuti tes potensi akademik sebagai persyaratan administrasi masuk kuliah,” kenangnya. Bersyukur, tepat satu bulan sebelum masa tenggat yang diberikan LPDP berakhir, LoA dari UGM sudah di tangan.

Proses pemulihan fisik yang belum selesai jadi tantangan tersendiri semasa menjalani perkuliahan. Sebab, sejumlah fisio terapi dan operasi harus dia jalani.

lpdp
lembaga pengelola dana pendidikan

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Belum lagi, konsentrasi pendidikan fisika murni ternyata jauh berbeda dengan ilmu pendidikan fisika yang ditekuninya semasa sarjana. Hal ini berimbas pada capaian nilai sejumlah mata kuliah esensial yang tidak memuaskan.

Namun demikian, memasuki semester kedua, Agus bergegas mengejar ketertinggalan. Kondisi fisik yang mulai pulih turut mendukung, sehingga pada semester ketiga, Agus berhasil memperoleh IPK yang nyaris sempurna pada semua mata kuliah. Bahkan, kompetisi dan penghargaan tingkat nasional dan internasional tidak jarang diperoleh Agus selama menjalani masa pendidikan.

Tesis pilihan

Perjuangan Agus membuahkan hasil gemilang. Tesisnya diapresiasi lewat penghargaan dari BNPB melalui Tangguh Award 2016 karena dinilai memberi kontribusi terhadap upaya penyelamatan dan pengurangan dampak bencana alam. Risetnya mengidentifikasi patahan bawah permukaan tanah dan pemetaan daerah rawan bencana gempa bumi berdasarkan data pengukuran mikrotremor. Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan sejumlah upaya edukasi dan mitigasi guna mengurangi risiko dan dampak kerusakan akibat bencana gempa.

Geofisika menjadi bidang konsentrasi yang ditekuni Agus. “Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Geofisika, kita dapat mengeksplorasi lokasi potensi kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aplikasi Geofisika juga dapat menganalisa gejala bencana alam guna mengurangi dampak dan resiko bencana yang berpotensi merugikan masyarakat,” ungkap lulusan sarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada 2005 silam ini.

Terus bergerak

Hingga nanti Agus ingin terus berdaya. Salah satunya menjadi pengajar yang menginspirasi generasi muda untuk mencintai sains. Pada bidang sosial masyarakat, Agus berharap bisa menjadi jembatan munculnya kelompok masyarakat yang berdaya dan mandiri. “Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan saat masih muda. Dunia akan berubah menjadi tempat yang lebih baik jika yang muda mau bergerak dan berkontribusi,”pesannya.

Agus menyadari, batasan pada diri seseorang hanyalah dirinya sendiri. “Tidak ada yang mustahil jika ada kemauan,” kata Agus. Mendedikasikan waktu dan berbagi untuk orang lain, bagi Agus berarti sedang berbuat baik pada diri sendiri. “Sebab berbagi mampu memperkaya dan menggembirakan jiwa,”ujarnya.

Teks Farida Rosadi

Pajak Berkeadilan Untuk e-Commerce

Teks Johana Lanjar Wibowo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Ekonomi berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan e-commerce mempunyai potensi yang tinggi bagi Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pertumbuhan perdagangan elektronik meningkat pesat sejalan dengan perkembangan internet dan kepercayaan masyarakat akan keamanan transaksi elektronik. Kini, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Akses komunikasi yang lebih mudah memungkinkan siapapun untuk terhubung kapanpun mereka menginginkannya.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 menunjukkan penetrasi pengguna internet Indonesia sebanyak 132,7 juta dari 256,2 juta orang penduduk. Sementara, data yang dilansir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukan, pada tahun 2015, pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta jiwa, meningkat cukup pesat jika dibandingkan dengan 88,1 juta jiwa pada 2014.

Sebanyak 77 persen penggunaan internet di Indonesia adalah untuk mencari informasi produk dan berbelanja daring. Pelanggan toko daring sudah mencapai 8,7 juta orang dan nilai transaksinya diprediksi mencapai USD 4,89 miliar pada tahun 2016. Setidaknya terdapat enam situs yang familiar digunakan oleh pembeli dalam transaksi perdagangan tahun 2015 yaitu olx.co.id, tokopedia.com, lazada.com, kaskus.co.id, dan bukalapak.com (Kominfo, 2017).

Melihat potensi tersebut, pada 10 November 2016 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan ke-14 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik yang terintegrasi. Tujuan kebijakan tersebut adalah mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula, pengembangan usaha, dan percepatan logistik.

Sebagai bentuk komitmen atas kebijakan tersebut, pada Juli 2017 pemerintah kemudian menerbitkan Perpres nomor 74 Tahun 2017 yang berisikan arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan elektronik.

Aspek Perpajakan Perdagangan Elektronik

Sektor perdagangan elektronik kini berpotensi untuk ektensifikasi perpajakan. Jauh sebelum Perpres ini diterbitkan, DJP telah menerbitkan kebijakan perpajakan atas model bisnis perdagangan elektronik. Pada praktiknya, ada 4 model transaksi perdagangan elektronik yang sering dijumpai, yaitu: pasar daring, iklan baris, penawaran harian, dan perdagangan ritel.

Pasar daring didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan toko di mal internet sebagai tempat pedagang menjual barang dan jasa. Iklan baris adalah kegiatan menyediakan tempat dan waktu untuk memajang konten berupa teks, grafik, video penjelasan, atau informasi lain seputar barang dan jasa bagi pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara.

Penawaran harian merupakan kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs penawaran harian sebagai tempat pedagang menjual barang dan jasa dengan menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran. Sementara, perdagangan ritel diartikan sebagai kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh pedagang di situs ritel daring.

Keempat model bisnis tersebut memiliki aspek perpajakan yang berbeda, baik Pajak Penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, seiring modifikasi dan perkembangan praktik yang terjadi di dunia usaha, perlu analisis lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi yang secara nyata terjadi. Hal ini sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce dan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-Commerce.

Ilustrasi
Venggi Obdi Ovisa

Kondisi sekarang ini, DJP belum memiliki basis data perdagangan elektronik yang dapat dijadikan acuan. Mengatasi hal tersebut, Perpres Nomor 74 Tahun 2017 mengamanatkan agar nantinya disusun regulasi kewajiban pelaku usaha elektronik untuk mendaftarkan diri, termasuk pelaku usaha asing. Pemberian kemudahan sebagaimana diatur dalam PP nomor 46 Tahun 2013 juga akan diterapkan kepada perdagangan elektronik yang omsetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Pemberian insentif pajak bagi investor sektor perdagangan elektronik juga menjadi perhatian pemerintah, misalnya melalui skema pemberian insentif bagi perusahaan modal ventura. Terkait pemberian insentif ini, Kementerian Keuangan akan menyiapkan regulasi terkait dokumen analisa pemberian insentif pajak, bagi pemodal individu (*angel investor*) dan sumber pendanaan lainnya yang mendanai usaha pemula. Dengan begitu, pedagang elektronik pemula dapat terus mengembangkan usahanya.

Rencana penerapan pengenaan PPh 1 persen bagi pedagang elektronik lokal juga akan dijalankan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah persamaan perlakuan perpajakan. Diperlukan regulasi yang mendukung pengenaan pajak atas pelaku usaha elektronik baik lokal maupun asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta keadilan.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 74 Tahun 2017, harapannya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan pada sektor perdagangan elektronik yang selama ini masih luput dari perhatian. Selain itu, Pemerintah juga bisa mulai menyiapkan instrumen guna membina sektor perdagangan elektronik. Misalnya saja terkait program pendanaan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, dan keamaan siber. Dengan begitu sektor perdagangan elektronik dapat terus hidup dan berkembang. Ibarat memelihara induk ayam, pemerintah cukup mengambil telurnya tanpa harus mematikan ayamnya.

Kendalikan Konsumsi, Cukai Rokok Rata-Rata Naik 10,4 persen di 2018

Reviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

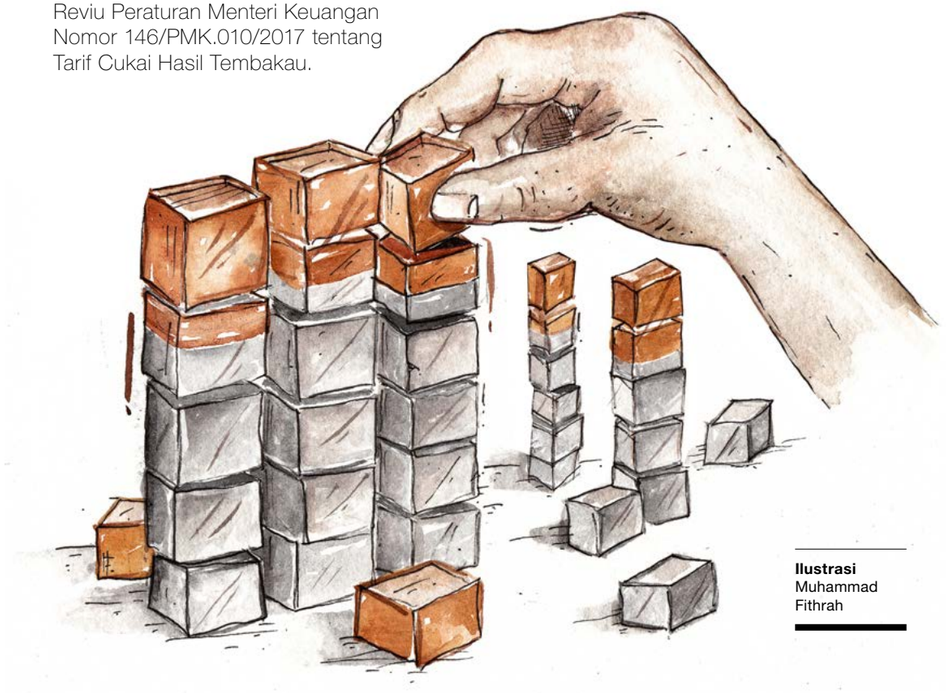

Ilustrasi Muhammad Fithrah

Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau dan memperhatikan aspek lainnya, seperti aspek kondisi industri dan tenaga kerja, aspek optimalisasi penerimaan cukai, dan aspek peredaran rokok ilegal, Kementerian Keuangan membuat aturan baru mengenai tarif cukai hasil tembakau. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (PMK Nomor 146) yang disahkan pada 24 Oktober 2017 oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang terakhir kali diubah dengan PMK Nomor 147/PMK.01/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 179/PMK.011/2012.

Memperhatikan Tenaga Kerja

PMK Nomor 146 dikeluarkan pemerintah selaras dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau maupun aspek-aspek lainnya. Kebijakan ini dilakukan Pemerintah dengan menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 10,04 persen. Dalam proses perhitungannya, besaran kenaikan tarif didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti jenis hasil tembakau (buatan mesin atau tangan), jenis industri (padat modal dan padat karya), maupun golongan pabrikan rokok. Sebagai contoh, kenaikan tarif untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sebesar 10,98 persen. Sedangkan untuk Sigaret Putih Mesin (SPM), tarif dinaikan menjadi sebesar 13,52 persen. Kenaikan tarif SKM dan SPM didasari pertimbangan karena produk tersebut merupakan produk yang diolah oleh pabrikan besar dan merupakan industri padat modal. Sementara itu, kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan (SKT) ditetapkan sebesar 7,27 persen. Keberpihakan terhadap industri kecil diwujudkan dengan tidak menaikkan SKT golongan III A. Keberpihakan pemerintah terhadap aspek tenaga kerja industri hasil tembakau juga ditunjukkan dengan mendekatkan secara bertahap tarif terendah untuk jenis SPM golongan II dengan tarif cukai tertinggi pada jenis sigaret tangan SKT golongan I yang tujuan akhirnya adalah tarif cukai untuk seluruh sigaret tangan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tarif cukai untuk sigaret mesin. Tarif cukai hasil tembakau tersebut ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk satuan barang atau gram hasil tembakau.

Sementara itu terkait harga jual produk, batasan Harga Jual Eceran (HJE) per batang atau gram (harus dalam kelipatan Rp 25) juga mengalami perubahan tarif, kecuali untuk harga jual cerutu. Pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir tidak dapat menurunkan HJE yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya. Di lain sisi, HJE per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor juga ditetapkan sama dengan HJE per batang atau gram untuk jenis hasil tembakau dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

Penyederhanaan Struktur Tarif

Selain kebijakan perubahan tarif, PMK Nomor 146 juga menyederhanakan struktur tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2018. Struktur tarif cukai merupakan jumlah strata tarif cukai hasil tembakau untuk jenis SKM, SKT, dan SPM berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan Pengusaha Pabrik, dan Batasan Harga Jual Eceran. Tujuan penyederhanaan struktur tarif ini bukan hanya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, namun juga meningkatkan tingkat *compliance*, penyederhanaan sistem administrasi, dan menghilangkan rentang harga. Penyederhanaan ini akan berlangsung bertahap hingga akhir 2021. Pada tahun ini, tarif cukai hasil tembakau terdiri 12 strata. Penyederhanaan struktur tarif berdasarkan jenis produk rokok yang dihasilkan dan tingkat produksi dari pabrik hasil tembakau. Selama periode tahun 2018 sampai dengan 2021, akan ada penyederhanaan struktur dari 10 layer menjadi 5 layer. Penyederhanaan struktur ini dilakukan dengan menghilangkan atau menggabungkan sejumlah lapisan dalam satu lapisan. Misalnya, tahun depan sigaret kretek tangan filter (SKTF) atau sigaret putih tangan filter (SPTF) dicoret dari strata tarif cukai hasil tembakau dan tidak dibatasi produksinya. Konsekuensinya tarif cukai menjadi satu dari sebelumnya tiga tarif.

VAPE Kena Cukai 57 persen

Dalam PMK Nomor 146 ini, pemerintah juga akan mengatur pungutan cukai terhadap produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang mulai marak peredarannya di masyarakat seperti ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (*snufftobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*). Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE) yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. Aturan ini merupakan aturan baru yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Pengaturan HPTL sangat penting karena masyarakat, bahkan anak-anak, mulai marak mengonsumsinya. Pengenaan cukai produk HPTL diharapkan dapat menaikkan harga produk-produk sehingga tidak terjangkau oleh anak-anak.

Penutup

Dalam rangka memastikan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan, penegakan aturan PMK Nomor 146 perlu terus dilakukan. Terlebih dahulu, dampak tarif baru ini juga perlu diinformasikan kepada masyarakat secara simultan dengan mensosialisasikan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Pengawasan dan penindakan di bidang cukai penting untuk dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Tujuan mengendalikan konsumsi rokok harus disertai dengan evaluasi apakah tujuan utama ini tercapai baik dari jumlah perokok maupun penjualan rokoknya, khususnya penurunan prevalensi perokok usia di bawah 15 tahun. Penurunan produksi dan konsumsi hasil tembakau diharapkan berdampak positif terhadap pengurangan pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok, serta pengurangan biaya kesehatan (klaim BPJS) atas penyakit yang ditimbulkan karena merokok.

Teks Budi Sulistyo

Ferry Irwandi

Di Balik Cerita Sang Juru Kamera

Ferry Irwandi

Foto Langgeng Wahyu

Awal September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak berbincang santai dengan Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, mengenai hobi membacanya. Salah seorang juru kamera Najwa Shihab yang sibuk mengabadikan momen tersebut berkata, "Bu, silakan menghadap kamera." "Tidak, saya biasa diarahkan sama videografer saya," ujar Sri Mulyani sembari melanjutkan perbincangan. Jawaban singkat itu tak pelak membuat sumringah sang videografer dimaksud.

Ferry Irwandi tak pernah menyangka bisa menjalani skenario hidup sebagai bagian tim publikasi andal Kementerian Keuangan. Ferry, sapaan akrabnya, tak pernah lelah belajar dan selalu rendah hati menerima segala perubahan. Pria kelahiran Jambi ini hidup dengan menjalani *passion*.

Kemampuannya di bidang seni telah terasah dengan baik sejak di bangku sekolah. Sejak SMP, Ferry terlibat aktif dalam kegiatan seni teater. Ia mulai belajar menulis naskah dan bermain peran pada sebuah klub teater lokal. Saat menjadi siswa SMA Titian Teras Jambi, Ferry mulai merambah dunia musik. Di sela-sela kegiatan sekolah berbasis semi militer tersebut, Ferry sibuk bermusik dalam sebuah grup band dan beberapa tampil dalam festival band di Jambi.

Ide brilian dari *nongkrong*

Pada September 2009, Ferry secara resmi menjalani rutinitas sebagai mahasiswa jurusan Kebendaharaan Negara STAN. Di tengah tuntuntan akademik yang luar biasa tinggi, Ferry tak ingin hidupnya dihabiskan di lingkungan kampus. Berawal dari berkumpul bersama teman-teman seusai kuliah, Ferry belajar banyak hal mengenai animasi, *editing* video, dan perfilman. Kebetulan sebagian teman-temannya adalah penggiat di unit kegiatan mahasiswa SCENE. SCENE merupakan klub pecinta dan pembuat film di STAN.

Video atau film adalah sebuah seni kolaborasi. Film yang diproduksi tidak hanya membutuhkan sinematografi yang bagus, tapi harus didukung dengan musik dan cerita yang baik. Semuanya akan berpadu menjadi satu harmoni dan satu komposisi yang indah. "Saat berkenalan dengan dunia videografi, saya merasa menemukan dunia yang sesungguhnya. Saya bisa mengeksplorasi banyak hal," tutur suami dari Muthia Nadhira sembari tersenyum.

Dari hasil diskusi bersama rekan-rekan penggiat film, yang menurut Ferry jauh lebih menarik daripada mengerjakan tugas kuliah, ia mulai memproduksi video *cover* lagu pertamanya di tahun 2010. Dalam video singkat yang diunggah di Youtube tersebut, Ferry menyanyi sambil memainkan gitar, kemudian ia mempelajari cara mengambil video dan mengeditnya. Video kolaborasi Ferry bersama rekan-rekannya merupakan sebuah karya yang mampu memicu semangat Ferry untuk belajar lebih banyak. Tak hanya mengenai videografi, Ferry banyak mengambil pelajaran mengenai desain dan fotografi.

Selepas kuliah, Ferry mendapat penempatan pertama di Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sekretariat Jenderal. Di LPSE, Ferry semakin mengembangkan kemampuannya di dunia videografi. Pria dari dua bersaudara ini mulai berani bereksplorasi dan berkarya di tempat kerja, beberapa diantaranya yaitu video profil LPSE, infografis, dan animasi.

Dua tahun mengabdi di LPSE, Ferry mendapat amanah bertugas di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi pada tahun 2016. Kala itu, Kementerian Keuangan sibuk dengan program nasional Amnesti Pajak. Ferry yang ditempatkan di Subbagian Publikasi Elektronik pun mendapat tantangan untuk membuat sebuah film mengenai Amnesti Pajak. "Saya menyanggupi permintaan pak Firdaus (Alm. Firdaus Rumbia, Kepala Bagian Manajemen Publikasi saat itu) untuk membuat film pendek. Tapi saya butuh tim dan kru," ujarnya.

Dibantu dengan tim yang solid, yang merupakan sinergi beberapa pegawai Direktorat Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ferry memulai debutnya dalam film pendek "Percaya." Film yang menuai banyak pujian di berbagai media sosial Kementerian Keuangan ini merupakan bukti sinergi nyata berbagai unit eselon I demi mencapai tujuan organisasi. "Kredit film 'Percaya' saya serahkan kepada seluruh tim. Saya belajar banyak hal dari film ini, khususnya teknis kamera yang saya dapat ilmunya dari mas Yon dan mas Tino (DJPB)," tuturnya.

Bagi Ferry, salah satu momen paling berkesan saat bekerja yaitu mengabadikan kegiatan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui vlog (video blog). Ferry patut berbangga, selama ini Menteri Keuangan mempercayakan teknis pengambilan video kepadanya. "Ibu Sri Mulyani *asik banget* kalau di depan kamera. Beliau sangat kooperatif. Ide yang saya ungkapkan ke beliau diterima dengan baik," ujar ayah dari Kirana Kala Senja (2 tahun) ini sembari tersenyum.

Mengikuti era informasi digital

Di era pesatnya informasi saat ini, Kementerian Keuangan pun terlihat mengalami perkembangan produk-produk publikasi. Ferry mengakui, perkembangan informasi digital selalu bergerak dinamis. Hal yang menjadi tren saat ini bisa jadi besok sudah usang. Sebagai bagian dari tim publikasi Kementerian Keuangan, Ferry dituntut memahami kebutuhan masyarakat dalam bentuk teknologi publikasi terkini.

"Pekerja birokasi seharusnya rendah hati dalam menerima perubahan. Jangan sampai merasa kita sudah melakukan yang terbaik dan terdepan," ujarnya. Tambah Ferry, pada dasarnya tidak ada satupun orang di dunia ini yang senang melihat iklan. Dulu, pemerintah cenderung menumpuk semua informasi dalam satu konten, namun lupa mencari cara bagaimana agar informasi tersebut ditonton masyarakat.

"Pada akhirnya kita melihat iklan layanan masyarakat yang membutuhkan biaya besar menjadi kurang efektif. Sekarang kita harus berubah, bukan mengubah substansi tapi mengubah *packaging*," katanya. Kemudian, apa yang harus dilakukan Kementerian Keuangan agar selalu *update* dengan perkembangan zaman? "Menurunkan ego, membuka diri dan pikiran, tidak berhenti belajar, karena akan selalu ada hal baru dan akan selalu ada ide-ide yang lebih baik dan brilian," ujarnya.

Tahun 2017, Ferry mulai mengumpulkan kepercayaan diri untuk mengikuti kompetisi video pendek. Bagi Ferry, keikutsertaannya dalam kompetisi merupakan ajang untuk belajar dan mengukur kemampuan diri. Kompetisi pertama Ferry yaitu Police Movie Festival 2017 yang diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dari sekitar 324 film yang masuk, Ferry masuk ke dalam kategori 10 film terbaik. Setelah melihat hasil penilaian akhir, Ferry cukup puas saat mengetahui hasil karyanya berada di posisi 4 teratas.

Ajang tersebut memicu semangat Ferry untuk berkarya lebih baik lagi. Pada kompetisi Color of Jakarta 2017 yang diadakan Pemprov DKI Jakarta, Ferry berhasil meraih Juara III kategori Video Story. Film pendek berjudul "Jakartaku yang Terkasih," itu diproduksi seorang diri. Selain itu, Ferry juga sukses meraih Juara III dalam Kompetisi Film Dokumenter BPJS Kesehatan 2017. Anak kedua dari dua bersaudara ini tak menyangka bahwa pemenang Juara I dan II kompetensi tersebut berasal dari tim televisi swasta terkemuka.

Ferry mengakui, sikap pantang menyerah yang dimilikinya diwarisi dari sang ayah. Sosok ayah yang bekerja keras dalam menghidupi keluarga sangat menginspirasi Ferry, terutama saat Ferry telah berkeluarga. "Jangan cepat berpuas diri, jangan pernah merasa paling pintar, jangan lupa balas kebaikan orang lain," kenangnya menirukan sang ayah.

Teks Pradany Hayyu

Ada Jerih dalam Proses yang Patut Dihargai

Seorang lelaki berpakaian rapi duduk di depan meja makan. Menunggu kedatangan pujaan hatinya dengan berdebar-debar. Bagaimana tidak, ini adalah hari istimewa, tepat 10 tahun usia pernikahannya. Sebuah kejutan kecil hendak dia berikan kepada istrinya. Padahal selama ini, belum pernah ia memberi kejutan istimewa, memasakkan makanan untuk kekasihnya itu.

Bayangan akan adanya pelukan hangat dan kecupan perlu diusir jauh-jauh. Hari yang paling membahagiakan justru berubah menjadi hari yang paling mengecewakan bagi sang lelaki. Mendapati dapurnya kotor saat pulang ke rumah, sang istri marah besar. Merendahkan 'kejutan tak penting' yang dilakukan sang suami.

Sayangnya, sang istri lupa. Ada jerih dan cinta yang besar di balik kekacauan di dapur. Penghargaan kecilnya bukan tak mungkin, mampu memberi semangat bagi sang suami untuk menunjukkan kerja cinta yang lebih besar, bagi kehidupan pernikahannya ke depan. Namun kali ini, semangat itu baru saja dia padamkan.

Dalam hidup, kita sepenuhnya menyadari. Bahwa setiap capaian yang kita peroleh, ada upaya dan jerih dibaliknya. Sayangnya, banyak dari kita terjebak pada hasil akhir. Padahal, tidak semua kerja keras kita membuahkan hasil yang gemilang. Berapa banyak kegagalan merupakan hasil dari usaha yang tidak main-main. Begitu pun hasil memuaskan, terkadang diperoleh lewat upaya yang tidak seberapa.

Maka, jangan pernah terjebak pada hasil akhir. Sebab ia tidak mampu menggambarkan upaya dan kerja keras yang seutuhnya. Terlebih, pada proses yang alpa kita ikuti. Mulai sekarang, pada setiap proses yang diupayakan, sudah selayaknya kita memberikan apresiasi. Sebab, pada setiap penghargaan sederhana, bukan tidak mungkin mampu menyalakan semangat untuk berusaha lebih baik lagi, bagaimanapun hasil akhirnya nanti.

Foto
Ilustrasi
Anas Nur Huda

Tidak perlu terburu menghakimi pada setiap hasil akhir yang kasat mata. Agar jangan sampai, ada semangat yang menguap saat penghargaan sederhana tidak kita berikan. Atau ada potensi yang diam-diam terkubur karena kita mengerdilkan usaha dan harapan yang telah dibangun dengan susah payah. Sebab kini kita tahu, bahwa hasil akhir tidak selalu mampu menggambarkan upaya yang seutuhnya. Ya, ia hanya sebentuk *output* dari sebuah kerja besar yang boleh jadi lebih berharga dari capaian itu sendiri.

Teks Farida Rosadi

Foto
http://marlinathemurderer.com/gallery/

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak

Film yang Sangat, Sangat Baik

"Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak" adalah film yang sangat, sangat baik. Di tahun 2017 ini kita mungkin juga telah menyaksikan banyak film-film bagus buatan sineas Indonesia menghiasi bioskop—sebut saja "Critical Eleven", "Pengabdi Setan", dan "Posesif". Namun, bagi saya, kehadiran "Marlina" di penghujung tahun ini benar-benar menjadi suatu pencapaian baru perfilman Indonesia. Tidak hanya telah menyabet berbagai penghargaan film internasional, "Marlina" menjelma suatu produk sinema yang komplet dari pelbagai sisi: tema yang relevan, musik dan visual yang indah, karakter yang ikonik, serta penyutradaraan yang kuat.

Dengan latar padang sabana di Sumba, Nusa Tenggara Timur, "Marlina" bercerita tentang seorang wanita sebatang kara bernama Marlina (yang diperankan dengan sangat, sangat baik oleh aktris Marsha Timothy) yang dirampok dan diperkosa oleh sekawanan pria. Alih-alih bersedih dan meratapi nasib, dengan nekat Marlina memilih untuk melawan para perampok dengan meracuni dan memenggal kepala salah satu perampok. Ia pun meninggalkan rumah, menuju kantor polisi untuk mengadukan kejadian yang telah menimpanya, dengan membawa kepala si perampok sebagai bukti.

Plot film ini mungkin terkesan simplistis; di sepanjang film beberapa penonton yang awas barangkali akan mempertanyakan mengapa-lantas-tokoh-ini-melakukan-itu dan sebagainya. Namun, jika dilihat garis besarnya, setiap proses pengambilan keputusan karakter-karakter dalam film ini punya landasan, baik secara logika maupun emosional. Melalui pemilihan sudut pandang kamera yang tidak biasa, sutradara Mouly Surya mengajak kita memahami pergulatan batin Marlina saat menghadapi tekanan para perampok dan kemudian dihantui pembunuhan yang telah ia lakukan, hingga ia memilih untuk melawan alih-alih menjadi korban atas kenaasan yang menimpanya.

Skrip film yang ditulis sang sutradara bersama Rama Adi—berbekal inspirasi cerita dari Garin Nugroho—memenggal plot "Marlina" ke dalam empat bagian atau babak. Pembabakan ini membuat film terasa cepat dan tidak menjemukan. Kehadiran tokoh-tokoh wanita lain seperti Novi (diperankan oleh Dea Panendra) atau bahkan Topan anak penjual sate dan ibu-ibu penumpang truk, memperluas fokus pembicaraan film lebih dari sekadar perjalanan Marlina mencari keadilan. Dalam durasi film yang berkisar 90 menitan ini, kita akan perlahan menyadari betapa tema feminisme dalam film "Marlina" terasa kuat dan relevan dengan masa modern.

Di menit-menit pertama menonton Marlina, Anda mungkin hanya akan tertegun dengan musik dan visual yang unik a la film koboi, serta unsur-unsur budaya seperti logat berbicara yang menarik. Namun selanjutnya, Anda akan sepakat bahwa "Marlina", melalui karakter utamanya, menjadi simbol feminisme yang menentang budaya patriarki: bahwa terkadang wanita kerap menjadi masyarakat kelas dua setelah pria, yang kehidupannya selalu bergantung pada pria di sekitarnya. Salut bagi seluruh kru, aktor, dan aktris yang berhasil menyuguhkan materi tersebut dengan efektif, menjadikan "Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak" sebuah film yang sangat, sangat baik.

Peresensi Akbar Saputra

Menjelajahi Eksotisme Kupang

Angin bertiup kencang. Badan pesawat baling-baling yang saya tumpangi berguncang keras, tak berdaya dihempas angin. Saya berdoa, semoga seluruh penumpang bisa mendarat di Kupang dengan selamat.

Ibukota Nusa Tenggara Timur ini, terletak di ujung barat Pulau Timor. Sekilas kota ini tampak kering dan gersang. Namun, kota ini menyimpan seribu keindahan. Salah satunya adalah Pantai Lasiana yang terletak tak jauh dari pusat kota.

Di sekeliling pantai banyak warga lokal memanjat kelapa untuk mengambil nira. Air nira dimasak hingga kental. Adonan nira tersebut kemudian dicetak menggunakan tempurung kelapa menjadi gula merah.

Agak jauh dari pusat kota, terhampar Pantai Tablolong dengan pasir putih bersih. Pantai ini merupakan destinasi favorit penggemar memancing. Sekitar sepuluh mil dari garis pantai menuju laut merupakan jalur migrasi ikan dari perairan Laut Timor menuju Laut Sawu. Tak heran, ikan tersedia melimpah.

Selain berenang atau bermain air, wisatawan dapat bersantai di pondok tradisional beratap daun lontar. Dalam bahasa lokal, bangunan berbentuk lingkaran ini disebut *lopo*. Pohon centigi yang tumbuh liar di sela-sela batu karang membuat pantai ini tampak makin eksotis.

Pada sore hari saya singgah ke Pantai Kelapa Lima di pusat kota, sejajar dengan jalan raya. Tak jauh dari pantai dibangun ruas jalan berlapis paving blok untuk pejalan kaki. Muda-mudi menyanyi ramai-ramai diiringi petikan gitar. Anak-anak kecil bermain air laut dengan riang. Seorang pelukis tampak merekam suasana dalam sebuah sketsa.

Saya berpapasan dengan dua orang nelayan yang sedang memindahkan perbekalannya ke perahu. Matahari perlahan menghilang di cakrawala, mengantarkan para nelayan mengadu nasib di lautan malam harinya.

Pantai Kelapa Lima merupakan surga hidangan laut. Berderet-deret kios menjajakan aneka ikan segar seperti kakap, tuna, kerapu, kuwe, kakatua, hingga udang dan cumi-cumi. Ikan diperoleh dari para nelayan yang baru pulang melaut sehingga kualitasnya masih sangat baik. Sentra penjualan ikan ini buka sejak sore hingga tengah malam.

Saya memesan kakap putih berukuran sedang seharga Rp70 ribu. Para pedagang juga menyediakan jasa memasak. Dengan tambahan ongkos Rp10 ribu per ekor ikan, pembeli bisa memesan aneka olahan ikan seperti bakaran, goreng kering, bumbu rica pedas, kuah kuning, atau asam manis sesuai selera.

Kurang dari satu jam setelah saya memesan, di meja sudah tersaji kakap merah bakar bumbu rica, sambal dabu-dabu, tumis kangkung, dan nasi putih. Semilir angin laut memasuki jendela yang dibiarkan terbuka.

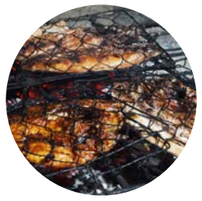

Kuliner di Kupang.

Tempat-tempat wisata di Kupang.

Warung makan itu sederhana saja, hanya berdinding papan dan beratap seng. Namun, menyantap makanan yang nikmat sembari berbincang santai di tepi pantai adalah kemewahan bagi saya.

Kupang juga memiliki destinasi menarik bernama Gua Kristal di daerah Bolok. Gua ini berada di balik karang. Dari mulut gua, saya harus menuruni tebing karang sedalam hampir dua puluh meter untuk mencapai dasar gua.

Gua Kristal terbentuk dari proses gempa tektonik yang mengakibatkan dasar lautan terangkat ke atas. Dasar gua dipenuhi air tawar yang sangat bening dan memantulkan warna biru kehijauan laksana kristal.Tak lama saya di sana, datang sekelompok remaja setempat yang mengajak saya untuk turut serta untuk berenang. Segar sekali rasanya.

Teks dan foto Adhi Kurniawan, Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Inspirasi dari Industri Animasi

Ronny Gani.

Foto
dok. pribadi

Mengawali pendidikan bidang arsitektur di Universitas Indonesia tidak menghalangi keinginannya yang kuat untuk masuk ke dunia perfilman. Justru dari bidang arsitektur, Ronny Gani atau biasa dipanggil Ronny pertama kali berkenalan dengan 3D *software* yang mengantarkannya untuk belajar mencoba hal-hal baru seperti film animasi. "Saya malah makin tertarik untuk meng-*explore* area lain dari penggunaan 3D *software* tadi, yaitu ke arah pembuatan Animasi & Visual Effects (VFX) untuk pembuatan film," ujarnya.

Kekurangan sumber belajar menjadi animator di Indonesia menjadikan Ronny belajar secara otodidak. Pada waktu itu, industri animasi masih belum begitu berkembang di Indonesia. Namun, ia mempunyai keyakinan akan adanya karier yang baik di dunia internasional. Ronny sempat bekerja di sebuah studio animasi di Batam sebelum akhirnya ia bekerja di Singapura. Di tempat terakhir, kemampuan animatornya pun mendunia. Ia mengerjakan beberapa proyek Hollywood seperti Star Wars: The Clone Wars TV series, The Avengers 1 dan 2, Transformers: Age Of Extinction, Pacific Rim, Warcraft, dan Ant-Man.

Menjadi seorang animator bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia menjelaskan bahwa hal yang paling mendasar dari seorang adalah harus memiliki *sense of art*, khususnya terkait dengan pergerakan atau *motion*. Hal tersebut penting karena animator sangat erat berhubungan dengan *motion*. Selain itu, *knowledge* dan *technical skill* juga perlu dibangun. Seorang animator pemula harus banyak mencari informasi tentang bagaimana membuat animasi yang baik dan *believeable*. Meskipun animasi adalah sebuah bentuk seni, animator profesional harus sadar kalau tugas utamanya adalah menghasilkan sebuah produk. Oleh karena itu, seorang animator harus menyesuaikan karyanya dengan keinginan dari sutradara, bukan keinginan pribadinya.

Terkait dengan industri animasi di dalam negeri, Ronny menilai saat ini tumbuh sangat baik. Banyak studio animasi lokal bermunculan. Namun demikian, ia masih menganggap banyak ruang *skill* animasi yang masih tertinggal jauh dengan negara lain. Untuk itu, ia berharap pemerintah juga bisa lebih aktif untuk memajukan industri kreatif animasi. Contohnya adalah dukungan pemerintah Singapura dan Malaysia dalam industri animasi lokal mereka. Ronny sendiri berinisiatif untuk membantu membangun industri animasi dalam negeri dengan membuka Bengkel Animasi di www.bengkelanimasi.com.

Melalui kursus *online* ini, ia ingin mengajarkan animasi kepada para generasi muda di Indonesia. Inisiatif tersebut muncul karena pengalaman pribadinya yang kesulitan dalam belajar animasi. Untuk itu, ia berpikir untuk membagikan pengalaman dan pengetahuannya yang selama ini didapatkan dari industri animasi profesional. "Harapan saya adalah untuk membantu menaikkan standar kualitas animator-animator Indonesia supaya bisa *compete* di industri internasional," harapnya.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim

Cerita : Irma Kesuma Dewi Gambar : Bimo Adi

SELAMAT TAHUN BARU
2018

Foto
Arfindo Briyan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA